



**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI TERJADINYA
FRAUD DI SEKTOR
PEMERINTAHAN
(Studi Pada SKPD Kota Binjai)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

**YESICA PATRICIA BR.SITEPU
1715100125**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : YESICA PATRICIA BR.SITEPU
NPM : 1715100125
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI TERJADINYA *FRAUD* DI
SEKTOR PEMERINTAHAN (STUDI PADA
SKPD KOTA BINJAI)

MEDAN, September 2021

KETUA PROGRAM STUDI

(Dr. Rahima Br. Purba, SE., MSi., Ak., CA)

PEMBIMBING I

(Dr. Renny Maisyarah, SE., Msi., Ak., CA)



DEKAN

(Dr. Onny Medaline, SH., MKn)

PEMBIMBING II

(Puja Rizqy Ramadhan, SE., MSi)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH
PANITIA UJIAN SARJANA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : YASICA PATRICIA BR.SITEPU
NPM : 1715100125
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI TERJADINYA *FRAUD* DI
SEKTOR PEMERINTAHAN (STUDI PADA
SKPD KOTA BINJAI)

MEDAN, September 2021

KETUA

(Bagus Handoko, SE., MM)

ANGGOTA I

(Dr. Renny Maisyarah, SE., Msi., Ak., CA)

ANGGOTA II

(Puja Rizqy Ramadhan, SE., MSi)

ANGGOTA III

(Pipit Buana Sari, SE., MM)

ANGGOTA IV

(Dito Aditia Darma NSt, SE., MSi)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YESICA PATRICIA SITEPU
Npm : 17151001125
Fakultas/Program Studi : SOSIAL SAINS /AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI TERJADINYA FRAUD DI
SEKTOR PEMERINTAHAN (STUDI PADA
SKPD KOTA BINJAI)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi Medan untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsi saya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensinya apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan September 2021



YESICA PATRICIA BR.SITEPU)
NPM: 1715100125

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Yesica Patricia Br.Sitepu
N. P. M : 1715100125
Tempat/Tgl. Lahir : BINJAI / 03 Januari 2000
Alamat : Jl.Teratai no 134A
No. HP : 081361638918
Nama Orang Tua : RIPIN SITEPU/RUPINA BR.SEMBIRING
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Akuntansi
Judul : ANALISIS YANG MEMPENGARUHI FAKTOR - FAKTOR TERJADINYA FRAUD DI SEKTOR PEMERINTAHAN (STUDI PADA SKPD KOTA BINJAI).

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada PAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan. 08 Juli 2021
Pernyataan



METERAI TEMPEL
TGL. 20
06450AHF934974535
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Yesica Patricia Br.Sitepu
1715100125

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa saurat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

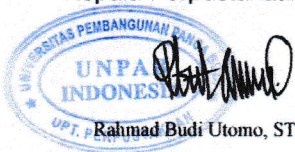
SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 28/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan nama saudara/i:

Nama : Yesica Patricia Br.Sitepu
M. : 1715100125
Kategori/Semester : Akhir
Jurusan : SOSIAL SAINS
Kelas/Prodi : Akuntansi

Sejak tanggal 12 Juli 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus bagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 12 Juli 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan


Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

Dokumen : FM-PERPUS-06-01
Jumlah : 01
Efektif : 04 Juni 2015

alyzed document: YESICA PATRICIA BR SITEPU_1715100125_AKUNTANSI.doc Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License03

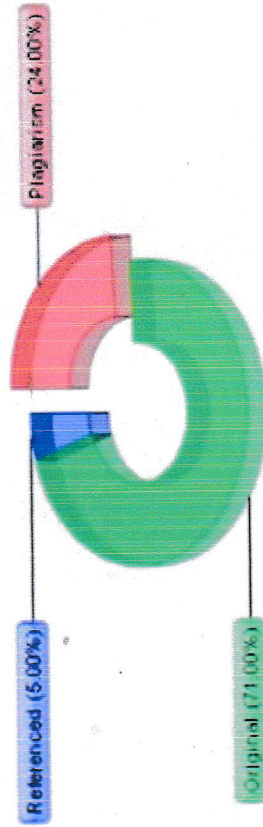
Comparison Preset: Rewrite Detected language:

Check type: Internet Check



Detailed document body analysis:

Relation chart:



Distribution graph:



Top sources of plagiarism: 27



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA
Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : YESICA PATRICIA BR. SITEPU
NPM : 1715100125
Program Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Puja Rizqy Ramadhan, SE., M.Si
Judul Skripsi : ANALISIS YANG MEMPENGARUHI FAKTOR - FAKTOR TERJADINYA FRAUD DI SEKTOR PEMERINTAHAN (STUDI PADA SKPD KOTA BINJAI).0

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
11 Februari 2021	ACC Seminar Proposal	Disetujui	
01 Juli 2021	Acc sidang	Disetujui	

Medan, 22 September 2021
Dosen Pembimbing,



Puja Rizqy Ramadhan, SE., M.Si



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808

MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : YESICA PATRICIA BR. SITEPU
NPM : 1715100125
Program Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Dr Renny Maisyarah, SE., M.Si, Ak.CA
Judul Skripsi : ANALISIS YANG MEMPENGARUHI FAKTOR - FAKTOR TERJADINYA FRAUD DI SEKTOR PEMERINTAHAN (STUDI PADA SKPD KOTA BINJAI).0

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
31 Maret 2021	ACC Seminar Proposal	Disetujui	
01 Juli 2021	ACC Ujian meja Hijau	Disetujui	

Medan, 22 September 2021
Dosen Pembimbing.



Dr Renny Maisyarah, SE., M.Si, Ak.CA

Acc Jilid Lux

Pf
Pusa Rizqy R.
22/9/2021



Acc Jilid Lux

Pf
22/09 - 2021

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI TERJADINYA
FRAUD DI SEKTOR
PEMERINTAHAN
(Studi Pada SKPD Kota Binjai)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

**YESICA PATRICIA BR.SITEPU
1715100125**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Yesica Patricia Br.Sitepu
 Tempat/Tgl. Lahir : BINJAI / 03 Januari 2000
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1715100125
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 142 SKS, IPK 3.53
 Nomor Hp : 081361638918
 Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :


No.	Judul
1.	ANALISIS YANG MEMPENGARUHI FAKTOR - FAKTOR TERJADINYA FRAUD DI SEKTOR PEMERINTAHAN (STUDI PADA SKPD KOTA BINJAI).0

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Coret Yang Tidak Perlu



 (Cahyo Pramono, S.E., M.M.)

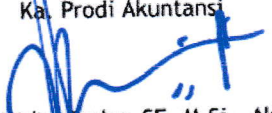
Medan, 31 Maret 2021
Pemohon,



 (Yesica Patricia Br.sitepu)

Tanggal :
 Disahkan oleh :
 Dekan

 (Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.)

Tanggal : 31/03-2021
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Dr Renny Masryah, SE., M.Si, Ak.CA)

Tanggal :
 Disetujui oleh:
 Ka. Prodi Akuntansi

 (Dr Rahima brurba, SE., M.Si., Ak.,CA.)

Tanggal :
 Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing II:

 (Puja Rizqy Ramadhan, SE., M.Si)

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris pengaruh kesesuaian kompensasi, penegakan hukum dan komitmen organisasi terhadap *fraud* di sektor pemerintahan. Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Binjai. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif bersifat kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi (*Adjusted R Square*). Dasar pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 60 pegawai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh positif signifikan terhadap *fraud* di sektor pemerintahan. penegakan hukum berpengaruh positif signifikan terhadap *fraud* di sektor pemerintahan. komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap *fraud* di sektor pemerintahan. Sedangkan secara bersama-sama kesesuaian kompensasi, penegakan hukum dan komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap *fraud* di sektor pemerintahan. Hal tersebut dapat dilihat pada hasil koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 59,4%. Sedangkan sisanya 40,6% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

Kata Kunci: Kesesuaian Kompensasi, Penegakan Hukum, Komitmen Organisasi dan Fraud di Sektor Pemerintahan.

ABSTRACT

The purpose of this study is to empirically prove the effect of the suitability of compensation, law enforcement and organizational commitment to fraud in the government sector. This research was conducted at the Binjai City Regional Work Unit (SKPD). This study uses a quantitative associative research type. The data analysis technique used is data quality test, classic assumption test, multiple linear regression test, hypothesis test and determination coefficient test (Adjusted R Square). The basis for sampling in this study using purposive sampling with a sample size of 60 employees. The results of this study indicate that the suitability of compensation has a significant positive effect on fraud in the government sector. Law enforcement has a significant positive effect on fraud in the government sector. Organizational commitment has a significant positive effect on fraud in the government sector. Meanwhile, the suitability of compensation, law enforcement and organizational commitment together have a significant positive effect on fraud in the government sector. This can be seen in the results of the coefficient of determination (Adjusted R Square), which means that the variability of the dependent variable which can be explained by the independent variable is 59.4%. While the remaining 40.6% is explained by other variables not included in the regression model.

Keywords: *Compensation Compensation, Law Enforcement, Organizational Commitment and Fraud in the Government Sector.*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanna Waa Ta'ala karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya *Fraud* di Sektor Pemerintahan (Studi Pada SKPD Kota Binjai)”**.

Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE, MM selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak Dr. Onny Medaline, SH., MKn selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu Dr. Rahima Br. Purba, SE., MSi., Ak., CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu Dr. Renny Maisyarah, SE., Msi., Ak., CA selaku dosen pembimbing 1 (satu) yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi saya.

5. Bapak Puja Rizqy Ramadhan, SE., MSi selaku dosen pembimbing 2 (dua) yang sudah banyak memberikan masukan di dalam perbaikan skripsi.
6. Terkhusus kedua orang tua penulis Ripin Sitepu dan Ibu Rupina Sembiring, yang telah memberikan semangat, do'a dan kasih sayang kepada penulis.
7. Kepada keluarga abang penulis Eben Edy Rumanta Sitepu dan Istri Yudika Stefani Siahaan beserta keponakan penulis Attira Elovani Sitepu, yang telah memberikan dukungan dan do'a kepada penulis.
8. Kepada abang penulis Michael Agung Sitepu, yang selalu memberikan do'a, semangat dan dukungan kepada penulis.
9. Seluruh Dosen Pengajar dan Staff Kepegawaian Universitas Pembangunan Panca Budi yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat penulis Irawati, Cut Agus Maudina, Yesica Patricia Sitepu dan farhan yang telah banyak memberikan saran dan masukan keoadaa penulis dalam menyempurnakan skripsi ini.
11. Kepada kakak, Debby Purnama Sitepu terimakasih telah membantu penulis dalam menyempurnakan skripsi ini.
12. Kepada teman yang selalu mendampingi kak gadi, kak eva, kak geta, bang andrew, bang bobo, bang agung yang selalu ada untuk memberikan semangat setiap penulis hampir jenuh dengan skripsi ini.
13. Terakhir untuk sahabat terbaik penulis, terimakasih untuk Cory, Jeje, Angel, Sonia dan Intan yang selalu mendengarkan keluh kesah skripsi penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu segala kritik dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini sangat diharapkan

penulis. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Medan, September 2021

Yesica Patricia Br.Sitepu
NPM: 1715100125

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	6
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	8
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Keaslian Penelitian	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Teori Atribusi	11
2.1.2 Teori Segitiga Kecurangan.....	13
2.1.3 Kecurangan.....	17
2.2 Penulisan Sebelumnya.....	36
2.3 Kerangka Konseptual	38
2.4 Hipotesis	40
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian.....	41
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	41
3.3 Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data.....	42
3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	45
3.4.1 Variabel Penelitian	45
3.4.2 Definisi Operasional.....	45
3.5 Teknik Pengumpulan Data	46
3.6 Teknik Analisis Data	47
BAB VI : METODOLOGI PENELITIAN	
4.1 Hasil Penelitian.....	55
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	55
4.1.2 Karakteristik Responden.....	58

4.1.3 Uji Kualitas Data	59
4.1.4 Uji Asumsi Klasik	62
4.1.5 Analisis Regresi Linear Berganda	66
4.1.6 Uji Hipotesis	67
4.1.7 Uji Koefisien Determinasi	70
4.2 Pembahasan	71
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	75
5.1 Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya	36
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	42
Tabel 3.2 Sampel Penelitian	43
Tabel 3.3 Definisi Operasional Variabel	46
Tabel 4.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	58
Tabel 4.2 Responden Berdasarkan Pendidikan	58
Tabel 4.3 Responden Berdasarkan Usia.....	59
Tabel 4.4 Responden Berdasarkan Masa Kerja.....	59
Tabel 4.5 Uji Validitas Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	60
Tabel 4.6 Uji Validitas Pengendalian Internal	60
Tabel 4.7 Uji Validitas Kesesuaian Kompensasi	61
Tabel 4.8 Uji Validitas Ketaatan Aturan Akuntansi.....	61
Tabel 4.9 Uji Reabilitas.....	62
Tabel 4.10 Uji Normalitas <i>Kolmogorov-Smirnov</i>	63
Tabel 4.11 Uji Multikolinearitas <i>Tolance</i> dan VIF	64
Tabel 4.12 Uji Autokorelasi	66
Tabel 4.13 Uji Regresi Linear Berganda.....	66
Tabel 4.14 Uji Parsial (Uji-t).....	68
Tabel 4.15 Uji Simultan (Uji-F)	69
Tabel 4.16 Uji Koefisien Determinasi	70

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Logo <i>Fraud Triangle</i>	14
Gambar 2.2 <i>The Fraud Tree</i>	20
Gambar 2.3 Kerangka Konseptual.....	40
Gambar 4.1 Logo Pemerintah Kota Binjai.....	55
Gambar 4.2 Grafik Histogram.....	62
Gambar 4.3 Grafik <i>Normality P-plot</i>	63
Gambar 4.4 Grafik <i>Scatter-plot</i>	65

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Kuisisioner Penelitian
- Lampiran 2. Tabulasi Data Responden
- Lampiran 3. Hasil Uji Validitas
- Lampiran 4. Hasil Uji Reabilitas
- Lampiran 5. Hasil Uji Asumsi Klasik
- Lampiran 6. Hasil Uji Regresi Linear Berganda
- Lampiran 7. Hasil Uji Hipotesis
- Lampiran 8. Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kecurangan merupakan tindakan penipuan atau kekeliruan yang dilakukan oleh seseorang atau badan secara sengaja yang mengakibatkan timbulnya manfaat yang tidak baik kepada individu atau entitas atau pihak lain. Terdapat 3 skema tindakan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dan karyawan di dalam perusahaan, yang direpresentasikan oleh ACFE dalam bagan kecurangan yang disebut dengan “*Fraud Tree*” atau “Pohon Kecurangan”. Pohon tersebut mempunyai 3 cabang, yaitu *corruption*, *asset misappropriation*, dan *financial statement fraud* (ACFE, 2016).

Kecurangan (*fraud*) dapat terjadi pada sektor swasta maupun sektor publik seperti instansi pemerintahan, yang pelakunya merupakan pegawai pihak dalam ataupun pihak luar organisasi. *Fraud* lebih banyak terjadi di instansi pemerintahan disebabkan organisasi tersebut memiliki struktur yang cukup kompleks, sistem birokrasi yang berbelit-belit, integritas lingkungan kerja yang rendah, kontrol yang tidak efektif, dan tekanan yang tinggi. Salah satu jenis *fraud* yang terjadi di instansi pemerintah yaitu berkaitan dengan praktik korupsi. Korupsi telah menjadi isu fenomenal dan menarik untuk dibahas dengan kasus-kasus yang kini tengah berkembang dalam masyarakat. Menurut UU 31/1999 Jo UU No 20/2001, terdapat tujuh jenis korupsi yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan.

Menurut *Transparency International* berdasarkan *Corruption Perceptions Index* (CPI) mengenai hasil upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan 176 negara, Indonesia berada pada peringkat ke-90 disebabkan oleh peringkat pertama korupsi justru terjadi di kalangan birokrasi, DPRD, dan kepala daerah. Bentuk korupsi yang dilakukan bukan lagi sekedar manipulasi uang transportasi, hotel, dan uang saku, tetapi tender proyek fiktif, pemasaran, mark up pengadaan barang hingga pengelakan pajak.

Berdasarkan *Rule of Law Index* tahun 2019 yang dikeluarkan oleh *World Justice Project*, Indonesia menempati urutan ke-62 dari 126 negara dengan skor 0,52 dari skala 0-1. Sedangkan dalam parameter tidak adanya korupsi, Indonesia menempati urutan ke 97 dari 126 Negara dengan skor 0,38 dari skala 0-1. Di tingkat regional, Indonesia menempati urutan ke-14 dari 15 Negara terkait dengan parameter tidak adanya korupsi. Kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2019 seperti: (1) Kasus dugaan korupsi penerbitan IUP di Kabupaten Kotawaringin Timur yang melibatkan Supian Hadi selaku Bupati dan merugikan negara sebesar Rp5,8 triliun, (2) Kasus dugaan korupsi penawaran penjualan atau pengambilalihan IUP seluas 400 hektare di Jambi yang melibatkan anak perusahaan PT Antam, PT Indonesia Coal Resources dengan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp91,5 miliar dan (3) Kasus dugaan korupsi pemberian IUP pada Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau yang melibatkan mantan Kepala Dinas ESDM dengan menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp30 miliar (*antikorupsi.org, 2019*).

Kota Binjai termasuk daerah yang memiliki kasus penyimpangan yang melibatkan pejabat daerah yang masih aktif. Berdasarkan data *TribunMedan.com*

terdapat beberapa kasus korupsi yang terjadi di Kota Binjai. Kasus tersebut antara lain kasus dugaan korupsi dan penggelembungan dana pengadaan alat Peraga Sekolah Dasar se-Kota Binjai. Anggaran yang digelembungkan itu mencapai Rp.1,2 miliar modus korupsi yang dilakukan tersangka dengan cara menggelembungkan dana atau *mark-up* hingga pengadaan bersifat fiktif . Selain itu contoh kasus lain yang terjadi yakni kasus korupsi alat kesehatan di Rumah Sakit Djoelham Kota Binjai, Sumatera Utara, dengan total kerugian negara sebesar Rp.4,7 miliar (*antaranews.com, 2019*).

Dalam melakukan kecurangan, setiap orang atau pelaku memiliki motivasi yang beraneka ragam. Dari beberapa kasus terlihat bahwa korupsi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung yaitu kesesuaian kompensasi, penegakan hukum dan komitmen organisasi. Tiga hal tersebut dapat memicu terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan.

Pemberian kompensasi yang sesuai kepada karyawan dapat memberikan kepuasan dan motivasi kepada karyawan dalam bekerja, sehingga mendorong mereka untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan tempat mereka bekerja. Dalam lingkup entitas, baik sektor swasta maupun sektor pemerintah salah satu penyebab terjadi perilaku korupsi yang terjadi di kalangan pegawai negeri sipil (PNS) dipicu karena kompensasi diterimanya tidak manusiawi, sehingga adanya ketidakpuasan karena kompensasi yang tidak memadai atau pekerjaan yang menjemukan juga dapat mendukung insiden-insiden pencurian oleh para pekerja. Pencurian tersebut dapat berupa pencurian uang, peralatan, serta persediaan barang yang dilakukan oleh pekerja.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Biasanya terjadi karena pengendalian internal perusahaan yang lemah, ketidakdisiplinan, tidak ada mekanisme audit, kurangnya pengawasan dan penyalahgunaan wewenang, serta sikap apatis yang dilakukan antar pegawai. Diantara elemen *fraud diamond* yang lain, opportunity merupakan elemen yang paling memungkinkan diminimalisir melalui penerapan proses, prosedur, dan upaya deteksi dini terhadap *fraud*.

Selain kedua faktor diatas, kecurangan (*fraud*) juga dipengaruhi oleh pembenaran komitmen organisasi. Komitmen organisasi merupakan rasa identifikasi kepercayaan terhadap nilai-nilai organisasi dan loyalitas keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi yang bersangkutan yang dinyatakan oleh seseorang pegawai terhadap organisasinya. Komitmen organisasi meliputi sikap menyukai organisasi dan kesediaan untuk mengusahakan tingkat upaya yang tinggi bagi kepentingan organisasi demi pencapaian tujuan.

Menurut Pramudita (2013) bahwa dalam suatu lingkungan yang lebih etis, karyawan akan cenderung mengikuti peraturan perusahaan dan peraturan-peraturan tersebut akan menjadi perilaku secara moral dan bisa diterima dengan adanya komitmen organisasi didalamnya.

Terkait faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecurangan *fraud* di sektor pemerintahan, beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya. Diantaranya adalah penelitian yang dilakukan Pramudita (2013) yang meneliti analisis *fraud* di sektor pemerintahan Kota Salatiga. Variabel yang digunakan adalah *fraud* di

sektor pemerintah, gaya kepemimpinan, keefektifan sistem pengendalian internal, komitmen organisasi, kesesuaian kompensasi, budaya etis organisasi, penegakan hukum. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara keefektifan sistem pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, budaya etis organisasi, gaya kepemimpinan terhadap *fraud* di sektor pemerintahan dan tidak terdapat pengaruh antara komitmen organisasi dan penegakan hukum terhadap *fraud* di sektor pemerintahan.

Penelitian lainnya juga dilakukan Faisal (2013) mengenai analisis *fraud* di sektor pemerintahan Kabupaten Kudus. Variabel yang digunakan adalah *fraud* di sektor pemerintahan, sistem pengendalian internal, gaya kepemimpinan, kesesuaian kompensasi, perilaku tidak etis, kultur organisasi, komitmen organisasi, penegakan hukum. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara sistem pengendalian internal, gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, penegakan hukum terhadap *fraud* di sektor pemerintahan, terdapat pengaruh positif antara perilaku tidak etis terhadap *fraud* di sektor pemerintahan, dan tidak terdapat pengaruh antara kepuasan akan gaji dan kultur organisasi terhadap *fraud* di sektor pemerintahan.

Penelitian Mustikasari (2013) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *fraud* di sektor pemerintahan Kabupaten Batang. Variabel yang digunakan adalah *fraud* di sektor pemerintahan, penegakan hukum, keefektifan pengendalian internal, asimetri informasi, kesesuaian kompensasi, keadilan prosedural, budaya etis manajemen, komitmen organisasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara penegakan hukum/peraturan, keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, budaya etis manajemen, dan

komitmen organisasi terhadap *fraud* di sektor pemerintahan, terdapat pengaruh positif antara asimetri informasi terhadap *fraud* di sektor pemerintahan, dan tidak terdapat pengaruh antara keadilan prosedural terhadap *fraud* di sektor pemerintahan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pramudita (2013) tidak konsisten dengan hasil penelitian Faisal (2013) dan Mustikasari (2013). Sehingga peneliti termotivasi untuk meneliti lebih lanjut dengan menggunakan variabel-variabel diantaranya yaitu kesesuaian kompensasi, penegakan hukum, dan komitmen organisasi. Variabel-variabel tersebut merupakan dasar untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan. Untuk obyek penelitian dipilih berdasarkan observasi awal dimana banyak ditemukan kasus korupsi yang terjadi di instansi pemerintah Kota Binjai.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud* di sektor Pemerintahan Kota Binjai. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya *Fraud* di Sektor Pemerintahan (Studi Pada SKPD Kota Binjai)**”.

1.2 Identifikasi masalah dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya dugaan kasus korupsi oleh pengendali internal pada SKPD Kota Binjai.
2. Pentingnya pertanggungjawaban atas laporan keuangan di Pemerintahan Kota Binjai guna mengetahui ada atau tidaknya kecenderungan terhadap kecurangan di dalam organisasi tersebut.
3. Adanya *research gap*, yaitu perbedaan hasil penelitian terdahulu.

1.2.2 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah yang akan dibahas yaitu faktor-faktor yang mendorong terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan yang di proksikan dengan kesesuaian kompensasi (X1), penegakan hukum (X2) dan komitmen organisasi (X3) dan *fraud* di sektor pemerintahan (Y).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintahan?
2. Apakah penegakan hukum berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintahan?
3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintahan?
4. Apakah kesesuaian kompensasi, penegakan hukum dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintahan?

1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap *fraud* di sektor pemerintahan.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh penegakan hukum terhadap *fraud* di sektor pemerintahan.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh komitmen organisasi terhadap *fraud* di sektor pemerintahan.
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kesesuaian kompensasi, penegakan hukum dan komitmen organisasi terhadap *fraud* di sektor pemerintahan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian dan mempelajari bagaimana pengaruh kesesuaian kompensasi, penegakan hukum dan komitmen organisasi terhadap *fraud* di sektor pemerintahan . Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, memberikan bukti empiris dan pemahaman tentang pengaruh kesesuaian kompensasi, penegakan hukum dan komitmen organisasi terhadap *fraud* di sektor pemerintahan.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk menambah informasi, pengetahuan, serta pemahaman mengenai tingkat kesesuaian kompensasi, penegakan hukum dan komitmen organisasi terhadap *fraud* di sektor pemerintahan. Selain itu juga mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama masa kuliah, sehingga dapat dijadikan bekal jika penulis telah berada dalam dunia kerja.

b. Bagi Akademisi dan Dunia Pendidikan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmu bagi khasanah dunia akuntansi serta sebagai tambahan riset di bidang akuntansi.

c. Bagi Peneliti Lainnya

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan referensi bagi institusi mengenai tingkat kesesuaian kompensasi, penegakan hukum dan komitmen organisasi terhadap *fraud* di sektor pemerintahan..

d. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memberikan masukan bagi perusahaan mengenai *fraud* di sektor pemerintahan. Selain itu juga sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam menentukan kebijakan apa yang dilakukan perusahaannya dalam pengambilan.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil penelitian yang berdasarkan referensi dari penelitian terdahulu yaitu Dian Mustika, S.E., Sri Hastuti, S.E., M.Si., Ak., CA., dan Sucahyo Heriningsih, S.E., M.Si., Ak., CA (2016) yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*): Persepsi Pegawai Dinas Kabupaten Way Kanan Lampung”. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu:

1. **Model penelitian:** Penelitian terdahulu menggunakan model asosiatif untuk 4 (empat) variabel dan regresi linier berganda. Dalam penelitian ini menggunakan model hubungan dengan regresi linear berganda untuk 4 (empat) variabel dan regresi linier berganda.
2. **Variabel penelitian:** Penelitian terdahulu menggunakan 3 (tiga) variabel bebas (asimetri informasi, penegakan peraturan dan kesesuaian kompensasi) dan 1 (satu) variabel terikat kecenderungan kecurangan (*fraud*). Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel bebas (kesesuaian kompensasi, penegakan hukum dan komitmen organisasi) dan 1 (satu) variabel terikat *fraud*.
3. **Jumlah observasi/sampel (n):** Penelitian terdahulu meneliti 65 responden Dinas Pemerintahan Kabupaten Way Kanan di Lampung sedangkan penelitian ini meneliti 91 responden SKPD Kota Binjai.
4. **Waktu Penelitian:** Penelitian terdahulu dilakukan tahun 2016 sedangkan penelitian ini dilakukan tahun 2020.
5. **Lokasi Penelitian:** Lokasi penelitian terdahulu di Dinas Pemerintahan Kabupaten Way Kanan di Lampung sedangkan penelitian ini dilakukan di Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Daerah Kota Binjai.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Menurut Robbins & Stephen P dalam Syahriani (2017), “Teori atribusi merupakan penjelasan dari cara-cara manusia menilai orang secara berlainan, tergantung pada makna apa yang dihubungkan ke suatu perilaku tertentu. Pada dasarnya teori ini menyarankan bahwa jika seseorang mengamati perilaku seseorang individu, orang tersebut berusaha menentukan apakah perilaku itu disebabkan oleh faktor internal atau eksternal”. Hal yang sama dikemukakan Ikhsan & Ishak (2005) bahwa, “Teori atribusi mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya. Teori ini dikembangkan oleh Fritz Heider yang berargumentasi bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan intelektual, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti faktor kemampuan usaha dan kekuatan eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar, seperti kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan”.

Teori atribusi menjelaskan tentang bagaimana pemahaman seseorang terhadap peristiwa di sekitar mereka, dengan mengetahui alasan atas kejadian yang mereka alami. *Dispositional attributions* atau penyebab internal mengacu pada aspek perilaku individual yang ada dalam diri seseorang seperti sifat, persepsi diri, kemampuan, motivasi. Sedangkan *situational attributions* atau penyebab eksternal yang mengacu pada lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi perilaku, seperti kondisi sosial,

nilai-nilai sosial, dan pandangan masyarakat. Dengan kata lain, setiap tindakan atau ide yang akan dilakukan seseorang akan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

Menurut Robbins dan Stephen dalam Syahriani (2017) memaparkan bahwa, penyebab individu atau situasi akan dipengaruhi oleh 3 faktor yang akan menyimpulkan atribusi seseorang:

- a. *Consensus* yaitu perilaku yang ditunjukkan jika semua orang menghadapi situasi yang serupa dan merespon dengan cara yang sama dengan kata lain jika orang lain setuju bahwa perilakunya diatur oleh beberapa karakteristik personal. Dari suatu perspektif atribusi, jika perilaku itu bersifat unik bagi satu orang maka dikatakan bahwa perilaku tersebut mempunyai konsensus yang rendah. Jika konsensus itu tinggi, seseorang akan diharapkan untuk memberikan suatu atribusi eksternal kepada suatu keadaan. Jika konsensus rendah hal tersebut akan dinilai sebagai bersifat internal.
- b. *Distinctiveness* yaitu perilaku yang ditunjukkan individu berlainan dengan situasi yang berlainan dengan kata lain perilaku dapat dibedakan dari perilaku orang lain saat menghadapi situasi yang sama. Apa yang ingin kita ketahui adalah perilaku tersebut luar biasa atau tidak. Jika luar biasa, kemungkinan besar pengamat akan memberikan atribusi eksternal kepada perilaku tersebut. Jika tindakan tersebut tidak luar biasa, hal tersebut akan dinilai sebagai bersifat internal.
- c. *Consistency* yaitu perilaku yang sama dalam tindakan seseorang dari waktu ke waktu.

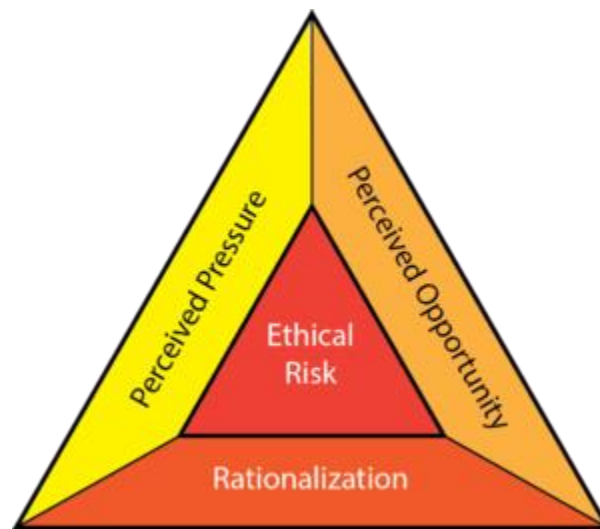
Berdasarkan teori atribusi secara spesifik, individu akan berusaha menganalisis mengapa peristiwa tertentu muncul dan dari hasil analisis tersebut akan

mempengaruhi perilaku mereka di masa mendatang. Proses atribusi juga dapat menjadi hal yang penting dalam memahami perilaku dari orang lain. Perilaku orang lain dapat diperiksa atas dasar keunikan, konsistensi dan konsensus. Keunikan merupakan tingkatan seseorang berperilaku secara serupa dalam situasi yang berbeda. Konsistensi merupakan tingkatan seseorang menunjukkan perilaku yang sama pada waktu yang berbeda. Konsensus merupakan tingkatan orang lain menunjukkan perilaku yang sama. Mengetahui sejauh mana perilaku seseorang menunjukkan kualitas ini dapat sangat bermanfaat dalam membantu memahami perilaku tersebut.

Adinda (2015) menjabarkan bahwa, “Perilaku seseorang dalam organisasi seperti perilaku pimpinan dan perilaku bawahan tidak terlepas dari teori ini. Tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemimpin ataupun orang yang diberikan wewenang disebabkan oleh atribut penyebab”.

2.1.2 Teori Segitiga Kecurangan (*Fraud Triangle Theory*)

Penelitian ini menggunakan *Fraud Triangle Theory* sebagai dasar teori utama. Dalam teori segitiga kecurangan, terdapat model segitiga kecurangan yang dibuat untuk menjawab pertanyaan, mengapa orang melakukan kecurangan, atau mengapa kecurangan terjadi. Berikut ini adalah tiga elemen yang terdapat dalam teori segitiga kecurangan yang pertama kali diperkenalkan oleh Cressey dalam Syahrani (2017). Ketiga faktor tersebut digambarkan dalam segitiga kecurangan (*Fraud Triangle*) yang ditunjukkan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 The Fraud Triangel

Sumber: *Fraud Triangle Theory* Tuanakotta (2010)

Fraud Triangle yang dijelaskan Tuanakotta (2010), “Adalah model yang menjelaskan alasan orang melakukan *fraud* termasuk korupsi”. Konsep segitiga kecurangan ini pertama kali diperkenalkan oleh Donald R. Cressey dalam Syahriani (2017) dalam disertasinya. Cressey tertarik pada *embezzlers* yang disebutnya sebagai “*trust violators*” atau pelanggar kepercayaan, yakni mereka yang melanggar kepercayaan atau amanah yang dititipkan kepada mereka. Cressey menyimpulkan bahwa:

“Trusted person become trust violator when they conceive of themselves as having financial problem which is non-shareable, are aware this problem can be secretly resolved by violation of the position of financial trust, and are able to apply to their own conduct in that situation verbalizations which enable them to adjust their conceptions of themselves as trusted person with their conceptions of themselves as users of the entrusted funds or property”.

Terjemahan:

Orang yang dipercaya menjadi pelanggar kepercayaan ketika ia melihat dirinya sendiri sebagai orang yang mempunyai masalah keuangan yang tidak dapat diceritakannya kepada orang lain, sadar bahwa masalah ini secara diam-diam dapat diatasinya dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai pemegang kepercayaan di bidang keuangan, dan memungkinkan menyesuaikan pandangan mengenai dirinya sebagai seseorang yang bisa dipercaya dalam menggunakan dana atau kekayaan yang dipercayakan.

Cressey dalam Tuanakotta (2010) menyimpulkan bahwa, “Kecurangan secara umum mempunyai tiga sifat dalam teori ini yaitu “kesempatan (*Opportunity*), tekanan (*Pressure*), dan rasionalisasi (*Rationalization*)”.

a. Tekanan (*Pressure*)

Tekanan adalah dorongan untuk melakukan kecurangan. Tekanan dapat mencakup hampir semua hal termasuk gaya hidup, tuntutan ekonomi, dan lain-lain, termasuk hal keuangan dan non keuangan yang dirasakan pelaku kecurangan yang dipandang sebagai kebutuhan keuangan kepada orang lain. Syahriani (2017) mendefinisikan, “*Pressure* sebagai sumber panas untuk api namun tidak berarti karena ada tekanan dalam diri seseorang, lantas orang tersebut akan melakukan *fraud*”. Terdapat tiga jenis tekanan yang memotivasi individu untuk melakukan *fraud* di perusahaan maupun organisasi tempatnya bekerja, yaitu:

1. *Employment pressure*, dimana individu tertekan untuk melakukan kecurangan karena tuntutan pekerjaan atau target kerja, atau karena kepentingan keuangan yang dimiliki manajemen perusahaan.

2. *External pressure*, misalnya ancaman terhadap stabilitas keuangan perusahaan, ekspektasi pasar, dan sebagainya.
3. *Personal pressure*, yaitu kondisi dimana individu melakukan kecurangan karena gaya hidup.

b. Kesempatan (*Opportunity*)

Kesempatan atau peluang adalah situasi yang membuka kesempatan bagi manajemen atau pegawai yang memungkinkan terjadinya kecurangan. Syahriani (2017) mendefinisikan bahwa, “Kesempatan sebagai bahan bakar yang terus membuat api atau dengan kata lain, walaupun individu memiliki tekanan dalam dirinya untuk melakukan *fraud*, itu tidak akan bisa dilakukan jika tidak ada kesempatan”. Kesempatan atau *opportunity* yang didefinisikan Tuanakotta (2010) sebagai peluang untuk melakukan kecurangan seperti yang dipersepsikan pelaku kecurangan. Mengungkapkan dari penelitian Cressey, pelaku kecurangan selalu memiliki pengetahuan dan kesempatan untuk melakukan tindakan agar tidak terdeteksi. Cressey berpendapat bahwa ada dua komponen peluang, yaitu:

1. *General information*, yaitu pengetahuan bahwa kedudukan yang mengandung kepercayaan dapat dilanggar tanpa konsekuensi. Pengetahuan ini diperoleh dari pelaku yang ia dengar atau lihat, misalnya dari pengalaman orang lain yang melakukan *fraud* dan tidak ketahuan atau terkena sanksi. Untuk melakukan *fraud* seseorang tidak cukup hanya dengan dorongan tekanan kebutuhan. Informasi yang dimiliki membentuk keyakinan bahwa karena kedudukan dan kepercayaan institusi yang melekat pada dirinya maka *fraud* yang dilakukannya tidak akan diketahui.
2. *Technical skill*, yaitu keahlian yang dimiliki seseorang dan yang menyebabkan seseorang tersebut mendapat kedudukan. Tanpa kemampuan yang memadai

menyembunyikan *fraud* atau korupsi tentu tidak mungkin untuk dilakukan apalagi untuk kasus-kasus korupsi yang bersifat sistemik.

c. Rasionalisasi (*Razionalitation*)

Rasionalisasi merupakan bagian *fraud triangle* yang paling sulit untuk diukur. Rasionalisasi yang dilakukan seseorang dengan beragam alasan tetapi akan selalu ada pembenaran didalamnya. Rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya kecurangan, dimana pelaku mencari pembenaran atas perbuatannya. “Rasionalisasi merupakan sikap karakter atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan manajemen atau pegawai melakukan tindakan tidak jujur, atau mereka berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasikan tindakan yang tidak jujur” (Tunggal, 2011). Dengan kata lain suatu dorongan mencari pembenaran atas tindakannya melakukan kecurangan walaupun hal tersebut bertentangan dengan sikap maupun perilaku seseorang tersebut.

Mustikasari (2013) menjabarkan bahwa, faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang mencari pembenaran (*razionalization*) atas tindakannya melakukan *fraud*, antara lain sebagai berikut:

1. Mencontoh atasan atau rekan kerja.
2. Merasa sudah berbuat banyak kepada organisasi.
3. Menganggap bahwa yang diambil tidak disengaja.
4. Dianggap hanya sekedar meminjam dan pada waktunya akan dikembalikan.

2.1.3 Kecurangan (*Fraud*)

Istilah *fraud* merupakan istilah hukum yang diserap ke dalam disiplin ilmu akuntansi, dan menjadi bagian penting dalam kosa kata akuntansi forensik. *Fraud* jika

diartikan secara harfiah, artinya adalah kecurangan. Namun, pengertian ini telah berkembang dan sekarang mempunyai cakupan yang luas. *Black Law Dictionary* mendefinisikan *fraud* sebagai “Segala macam yang dapat dipikirkan manusia, dan yang diupayakan oleh seseorang atau beberapa orang, untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan saran yang salah atau pemaksaan kebenaran, dan mencakup semua cara yang tidak terduga, penuh siasat, serta menggunakan setiap cara yang tidak jujur yang menyebabkan orang lain tertipu”. Secara singkat dapat dikatakan bahwa *fraud* adalah perbuatan curang yang berkaitan dengan sejumlah uang atau properti.

Sedangkan menurut Gbegi D & Adebisi, J.F (2015), “*Fraud* dapat diartikan sebagai istilah generik dan mencakup semua sarana dengan berbagai kecerdikan manusia yang dirancang oleh satu individu untuk mendapatkan keuntungan lebih dari yang lain dengan keterangan palsu”.

Sementara itu, IIA (*Institute Of Internal Auditors*) dalam *Standard Glossary* menjelaskan *fraud* dengan menyatakan bahwa:

“Fraud encompasses an array of irregularities and illegal acts characterized by intentional deception. It can be perpetrated for the benefit of or to the detriment of the organization and by persons outside as well as inside organization”.

Artinya kecurangan adalah suatu tindakan penipuan yang ilegal dan mencakup berbagai penyimpangan yang ditandai dengan tindak penipuan yang disengaja. Hal ini biasanya dilakukan oleh orang luar maupun dalam suatu organisasi untuk kepentingan yang dapat merugikan organisasi tersebut. Selain itu Ikatan Akuntansi Indonesia (2001) menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai berikut:

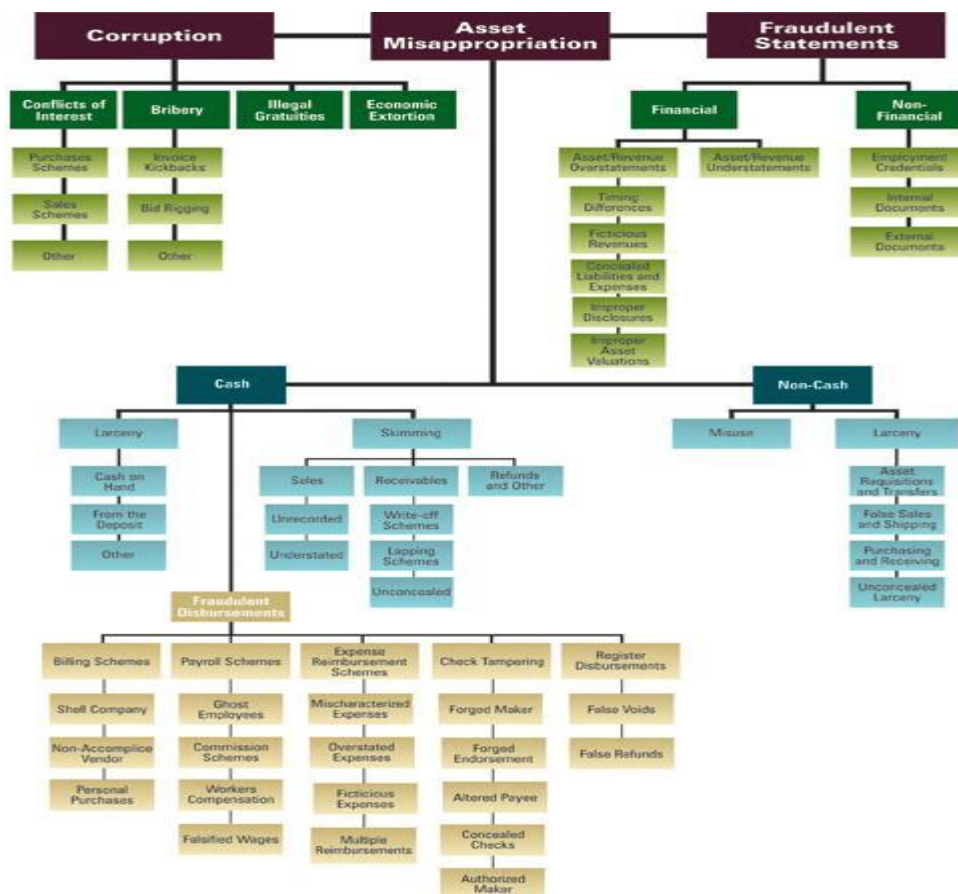
1. Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam pelaporan keuangan.
2. Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) yang berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Tuanakotta (2010), menyebutkan beberapa pasal yang mencakup pengertian *fraud* seperti:

1. Pasal 362 Pencurian (definisi KUHP): mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
2. Pasal 372 Penggelapan (definisi KUHP): dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
3. Pasal 378 Perbuatan curang (definisi KUHP): dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) dalam Syahriani (2017) menggunakan istilah “*occupational Fraud and abuse*” dan mendefinisikannya sebagai penggunaan kedudukan seseorang untuk memperkaya

diri sendiri melalui penyalahgunaan yang disengaja atau penyalahgunaan sumber daya atau aset organisasi. *Occupational tree* ini mempunyai tiga cabang utama, yakni *Fraudulent Statements*, *Asset Misappropriation* dan *Corruption*. *Fraud* bukan sekedar korupsi saja melainkan ada banyak turunan dari *fraud*. Berikut ini berbagai macam turunan *fraud* dalam gambar 2.2 *fraud tree*.



Gambar 2.2 The Fraud Tree

Sumber: *Association of Certified Fraud Examiners dalam Tuanakotta (2010)*

1) Kecurangan Pelaporan (*Fraudulent Statements*)

Jenis *fraud* ini sangat dikenal para auditor yang melakukan general audit. *Fraud* ini berupa salah saji baik itu *overstatement* maupun *understatement*. *Fraudulent statement* meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu

perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah *window dressing* (Tuanakotta, 2010).

Cabang dan ranting yang menggambarkan *fraud* yang diberi label “*Fraudulent Statements*” dapat dilihat dari sisi kanan *fraud tree*. Jenis *fraud* ini sangat dikenal para auditor yang melakukan *general audit*. Ranting pertama menggambarkan *fraud* dalam menyusun laporan keuangan. *Fraud* ini berupa salah saji (*misstatements* baik *overstatements* maupun *understatements*). Cabang dari ranting ini ada dua. Pertama, menyajikan asset atau pendapatan lebih tinggi dari sebenarnya (*Asset/Revenue overstatements*). Kedua, menyajikan asset atau pendapatan lebih rendah dari yang sebenarnya (*Asset/ Revenue Understatements*).

Ranting kedua menggambarkan *fraud* dalam menyusun laporan non-keuangan. *Fraud* ini berupa penyampaian laporan non-keuangan secara menyesatkan, lebih bagus dari keadaan yang sebenarnya, dan seringkali merupakan pemalsuan atau pemutar balik keadaan.

2) Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*)

Asset Missappropriations atau “pengambilan aset” secara ilegal dalam bahasa sehari-hari disebut mencuri (Tuanakotta, 2010). Namun, dalam istilah hukum, “mengambil” aset secara ilegal (tidak sah atau melawan hukum) yang dilakukan oleh seseorang yang diberi wewenang untuk mengelola atau mengawasi aset tersebut, disebut menggelapkan. Istilah pencurian, dalam *fraud tree* disebut pencurian (*larceny*).

“*Larceny* atau pencurian adalah bentuk penjarahan yang paling kuno dan dikenal sejak awal peradaban manusia” (Tuanakotta, 2010). Peluang untuk terjadinya penjarahan jenis ini berkaitan erat dengan lemahnya sistem pengendalian intern, khususnya yang berkenaan dengan perlindungan keselamatan aset (*safeguarding of assets*). Pencurian melalui pengeluaran yang tidak sah (*fraudulent disbursements*) sebenarnya satu langkah lebih jauh dari pencurian. Sebelum tahap pencurian, ada tahap perantara”.

“*Billing Schemes* adalah skema permainan (*schemes*) dengan menggunakan proses billing atau pembebanan tagihan sesuai sarananya” (Tuanakotta, 2010). Pelaku *fraud* dapat mendirikan perusahaan “bayangan” (*shell company*) yang seolah-oleh merupakan pemasok atau rekanan atau kontraktor sungguhan. Perusahaan bayangan ini merupakan sarana untuk mengalirkan dana secara tidak sah ke luar perusahaan”.

“*Payroll schemes* adalah skema permainan melalui pembayaran gaji. Bentuk permainannya antara lain dengan pegawai atau karyawan fiktif (*ghost employee*) atau dalam pemalsuan jumlah gaji” (Tuanakotta, 2010). Jumlah gaji yang dilaporkan lebih besar dari gaji yang dibayarkan”.

“*Expense Reimbursement schemes* adalah skema permainan melalui pembayaran kembali biaya-biaya, misalnya biaya perjalanan”. Seorang *salesman* mengambil uang muka perjalanan dan kembalinya dari perjalanan, ia membuat perhitungan biaya perjalanan. Kalau biaya perjalanan melampaui uang mukanya, ia meminta *reimbursement* atau penggantian. Ada beberapa skema permainan melalui skema *reimbursement* ini. Rincian biaya menyamakan jenis pengeluaran yang sebenarnya (*macharacterized expenses*). Contoh perusahaan tidak memberikan

penggantian konsumsi alkohol, pengeluaran ini disamarkan sebagai biaya makan dan minum. atau biayanya dilaporkan lebih besar dari pengeluaran yang sebenarnya ini lazimnya dilakukan dalam pengeluaran yang tidak ada atau tidak memerlukan bukti pendukung atau biayanya sama sekali fiktif (*fictitious expense*)”.

“*Check Tampering* adalah skema permainan melalui pemalsuan cek”. Yang dipalsukan bisa tandatangan orang yang mempunyai kuasa mengeluarkan cek, *endorsemennya* atau nama kepada siapa cek dibayarkan, atau ceknya disembunyikan. Dalam contoh terakhir, pegawai meminta dua buku cek dari bank yang diketahui secara resmi hanya satu buku, sedangkan pengeluaran melalui buku cek kedua dirahasiakan. Di Amerika Serikat, cek yang sudah diuangkan, akan dikembalikan oleh bank kepada yang mengeluarkan cek”.

Register Disbursements adalah pengeluaran yang sudah masuk dalam *Cash register*. Skema permainan melalui *Register Disbursements* pada dasarnya ada dua, yakni *false refunds* (pengembalian uang yang dibuat-buat) dan *false voids* (pembatalan palsu).

3) Korupsi (*Corruption*)

Istilah korupsi (*corruption*) disini serupa tetapi tidak sama dengan istilah korupsi dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Jenis *fraud* ini paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi. Bentuk *corruption* menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) digambarkan dalam empat ranting, yakni *conflicts of interests, bribery, illegal gratuities, dan economic extortion*. Cabang dan ranting yang menggambarkan *fraud* yang diberi label “*corruption*” dapat dilihat di sisi kiri dari *fraud tree*.

“*Conflict of interest* atau benturan kepentingan sering kita jumpai dalam berbagai bentuk, diantaranya bisnis pelat merah atau bisnis pejabat (penguasa) dan keluarga serta kroni mereka yang menjadi pemasok atau rekanan di lembaga-lembaga pemerintah dan di dunia bisnis sekalipun”.

“*Kickback* (secara harfiah berarti “tendangan balik”), merupakan kondisi dimana si penjual meng-“ikhhlaskan” sebagian dari hasil penjualannya” yang diikhhlaskannya itu bisa di atur di muka atau diikhhlaskan sepenuhnya kepada “keikhhlasan” penjual. Dalam hal terakhir, apabila penerima *kickback* menganggap *kickback* yang diterimanya terlalu kecil maka ia akan mengalihkan ke rekanan yang lebih “ikhhlas” (memberi *kickback* yang lebih tinggi”.

Kickback berbeda dengan *bribery*. Dalam hal *bribery* pemberinya tidak “mengorbankan” suatu penerimaan. Misalnya apabila seseorang menyuap atau menyogok seorang penegak hukum, ia mengharapkan keringanan hukuman. Dalam contoh *kickback* tersebut, pemberinya menerima keuntungan materi. Dalam hal *kickback*, si pembuat keputusan (atau yang dapat mempengaruhi pembuat keputusan) dapat “mengancam” sang rekanan. Ancaman ini bisa terselubung tetapi tidak jarang pula dilakukan secara terbuka. Ancaman ini bisa merupakan pemerasan (*economic extortion*).

“*Illegal gratuities* adalah pemberian atau hadiah yng merupakan bentuk terselubung dari penyuapan”. Di Indonesia, *illegal gratuities* dapat dilihat dalam bentuk hadiah perkawinan, hadiah ulangtahun, hadiah perpisahan, hadiah kenaikan pangkat dan jabatan dan lain- lain yang diberikan kepada pejabat”.

Kesimpulan dari beberapa pendapat diatas adalah bahwa *fraud* dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan yang ilegal untuk memperkaya diri sendiri terhadap penipuan yang disengaja, pelanggaran terhadap kepercayaan, merekayasa, menggelapkan yang merubah suatu asset perusahaan secara tidak wajar untuk kepentingan sendiri dengan tindakan yang bertentangan atau melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang di dalam ataupun diluar organisasi, dengan maksud mendapatkan keuntungan baik secara individu maupun kelompok yang merugikan orang lain dengan cara yang ilegal.

Menurut Suprajadi dalam Syahriani (2017), “Pelaku kecurangan (*fraud*) dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok:

a. *First-time offenders*

Merupakan tipe pelaku tanpa latar belakang kriminal. Pelaku memiliki tekanan dalam kehidupannya melewati batas kapasitas penghasilannya atau pelaku merasionalisasi perilakunya bahwa hal biasa jika melakukan penggelapan. Jika faktor tekanan dan rasionalisasi melampaui faktor takut untuk terdeteksi, maka seseorang akan mencari kelemahan pengendalian internal atau kesempatan untuk melakukan kecurangan.

b. *Repeat offenders*

Hasil statistik menunjukkan bahwa seseorang yang melakukan kecurangan internal memiliki kecenderungan tinggi untuk melakukan kecurangan lebih dari satu kali. Dalam hal ini, faktor tekanan dan rasionalisasi akan kurang dominan dibandingkan dengan tipe *first-time offenders*. Faktor kesempatan akan menjadi pemicu untuk melakukan kecurangan.

c. *Organized crime groups*

Kelompok kecurangan tipe ini termasuk kelompok profesional, bisa juga secara individu, yang biasanya melakukan kecurangan dengan tipe khusus.

d. *Intenally committed for the perceived benefit of the corporation.*

Pelaku kecurangan biasanya pegawai yang percaya bahwa tindakan kecurangan yang dilakukan adalah untuk kebaikan perusahaan. Secara khusus, dominasi faktor tekanan dan rasionalisasi terhadap kesempatan kondisinya sama seperti tipe *firts-time offender* maupun *repeat*.

4) Kesesuaian Kompensasi

Kompensasi atau gaji adalah salah satu hal yang penting bagi setiap karyawan atau pegawai yang bekerja dalam suatu perusahaan, karena dengan gaji yang diperoleh seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut. Pemberian kompensasi yang sesuai dengan kontribusi yang diberikan karyawan kepada organisasi. Salah satu tujuan utama manusia bekerja adalah untuk mendapatkan gaji atau kompensasi yang berupa uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Gibson J.L *et al* dalam Syahriani (2017) Pemberian kompensasi yang sesuai kepada karyawan dapat memberikan kepuasan dan motivasi kepada karyawan dalam bekerja, sehingga mendorong mereka untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan tempat mereka bekerja.

Menurut Mangkunegara (2010) bahwa gaji atau kompensasi melibatkan pertimbangan atau keseimbangan perhitungan. Kompensasi merupakan sesuatu yang dipertimbangkan sebagai sesuatu yang sebanding. Di dalam kepegawaian, hadiah

yang berupa uang, merupakan kompensasi yang diberikan pegawai sebagai penghargaan dari pelayanan mereka terhadap pekerjaan. Selain itu, menurut Faisal (2013) mendefinisikan bahwa, “Kompensasi berdasarkan klasifikasinya, yang terdiri dari kompensasi tunai (*cash compensation*), kompensasi kotor (*gross compensation*), dan kompensasi bersih (*net compensation*). Kompensasi tunai adalah imbalan dalam bentuk gaji, bonus tunai, dan insentif jangka pendek”. Kompensasi kotor adalah imbalan yang berbentuk biaya penggajian atas semua keuntungan pegawai dan tunjangan baik total maupun kompensasi tunai. Sementara kompensasi bersih adalah imbalan yang digunakan dengan membandingkan imbalan yang dihitung setelah pajak.

Menurut Mangkunegara (2010) bahwa ada enam faktor yang mempengaruhi kebijakan kompensasi, yaitu:

1) Faktor Pemerintah

Peraturan pemerintah yang berhubungan dengan penentuan standar gaji minimal, pajak penghasilan, penetapan harga bahan baku, biaya transportasi/angkutan, inflasi maupun devaluasi yang sangat mempengaruhi perusahaan dalam menentukan kebijakan kompensasi pegawai.

2) Penawaran Bersama Antara Perusahaan dan Pegawai

Kebijakan dalam menentukan kompensasi dapat dipengaruhi pula pada saat terjadinya tawar menawar mengenai besarnya upah yang harus diberikan oleh perusahaan kepada pegawainya. Hal ini terutama dilakukan oleh perusahaan dalam merekrut pegawai yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu yang sangat dibutuhkan di perusahaan.

3) Standar dan Biaya Hidup Pegawai

Kebijakan kompensasi perlu mempertimbangkan standar dan biaya hidup minimal pegawai. Hal ini karena kebutuhan dasar pegawai harus terpenuhi. Terpenuhinya kebutuhan dasar pegawai dan keluarganya, maka pegawai akan merasa aman.

4) Ukuran Perbandingan Upah

Kebijakan dalam menentukan kompensasi dipengaruhi pula oleh ukuran besar kecil perusahaan, tingkat pendidikan pegawai, masa kerja pegawai. Artinya, perbandingan tingkat upah pegawai perlu memperhatikan tingkat pendidikan, masa kerja, dan ukuran perusahaan.

5) Permintaan dan Persediaan

Menentukan kebijakan kompensasi pegawai perlu mempertimbangkan tingkat persediaan permintaan pasar. Artinya, kondisi pasar pada saat itu perlu dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan tingkat upah pegawai.

6) Kemampuan Membayar

Menentukan kebijakan kompensasi pegawai perlu didasarkan pada kemampuan perusahaan dalam membayar upah pegawai. Artinya, jangan sampai menentukan kebijakan kompensasi diluar batas kemampuan yang ada pada perusahaan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tindakan kecurangan (*fraud*) dapat terjadi karena adanya tekanan bahwa pegawai merasa kompensasi yang diterima tidak sesuai dengan pekerjaan yang sudah dilakukan. Sehingga kesesuaian kompensasi sangat mempengaruhi kinerja pegawai, dengan pemberian kompensasi yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai diharapkan dapat membuat pegawai merasa tercukupi sehingga akan meningkatkan kinerja pegawai

dan mengurangi tindakan kecurangan (*fraud*). Dari beberapa defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa kesesuaian kompensasi merupakan hasil kerja atau balas jasa pegawai yang berwujud nominal (*uang*) yang diterima para pegawai sebagai balas jasa atas kerja yang diberikannya terhadap perusahaan sebagai timbal balik dari pekerjaan mereka. Kompensasi dapat berperan dalam meningkatkan motivasi karyawan untuk bekerja lebih efektif dan produktif, sebab kompensasi adalah alat untuk memenuhi berbagai kebutuhan karyawan, sehingga tinggi rendahnya kompensasi yang diberikan akan mempengaruhi kinerja dan kesetiaan karyawan.

5) Penegakan Hukum

Dalam arti luas proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Menurut Lister (2015), “Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa”.

Menurut Undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) Perda dibentuk dalam

rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas daerah masing-masing.

Penegakan hukum dilandasi oleh nilai etik, moral dan spritual yang memberi keteguhan komitmen. Penegakan hukum, dengan demikian lebih dari sekadar menegakkan kebenaran formal, tetapi juga ditujukan untuk mencari kebenaran materil yang diharapkan dapat mendekati kebenaran yang bersifat hakiki. Tanggung jawab penegak hukum dengan demikian bertumpu kepada sikap etis, moral dan spiritual.

Di negara Indonesia sendiri ada beberapa indikator yang mempengaruhi proses penegakan hukum atau *law enforcement* menjadi kurang efektif. Untuk menganalisisnya, perlu meminjam teori *Law Friedman* (dalam bukunya *The Legal System: A Social Science Perspective*, 1975). Friedman menggunakan tiga pendekatan yaitu:

1. Substansi Perundang-Undangan

Subtansinperundang-undnagan baik yang dibuat oleh legislatif dengan persetujuan bersama, eksekutif maupun kewenangan eksekutif membentuk peraturan dibawah undang-undang dan seterusnya.

2. Struktur Organisasi Pengadaan dan Penegakannya

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat.

3. Budaya

Budaya merupakan unsur yang harus diperhatikanmanakala kita sedang

mengamati dan terlibat dalam proses penegakan hukum.

Berbeda dengan Soejono Soekanto (2017) yang menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dari beberapa defenisi dapat dikatakan bahwa penegakan hukum melibatkan semua objek dalam setiap hubungan hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya dan untuk memastikan tegaknya sistem hukum tersebut apabila diperlukan aparaturnya penegak hukum itu, diperkenankan untuk menggunakan daya paksa dalam menjalankan suatu proses upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku.

6) Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi merupakan rasa identifikasi kepercayaan terhadap nilai-nilai organisasi dan loyalitas keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi yang bersangkutan yang dinyatakan oleh seseorang pegawai terhadap organisasinya. Komitmen organisasi meliputi sikap menyukai organisasi dan kesediaan untuk

mengusahakan tingkat upaya yang tinggi bagi kepentingan organisasi demi pencapaian tujuan.

Hal lain dikemukakan oleh Najahningrum (2013) bahwa, “Komitmen organisasi adalah individu yang memiliki keinginan untuk berbuat etis terhadap organisasinya dengan tujuan agar terciptanya tujuan yang diinginkan tidak lain semata-mata untuk kepentingan organisasi tersebut”. Komitmen organisasi merupakan tingkat kepercayaan dan penerimaan tenaga kerja terhadap tujuan organisasi dan mempunyai keinginan untuk tetap ada di dalam organisasi tersebut.

Ikhsan & Ishak (2015) mengemukakan tiga komponen mengenai komitmen organisasi, yaitu:

- 1) Komitmen kontinu (*continuance commitment*) muncul apabila karyawan tetap bertahan pada suatu organisasi karena membutuhkan gaji dan keuntungan-keuntungan lain, atau karena karyawan tersebut tidak menemukan pekerjaan lain. Dengan kata lain, karyawan tersebut tinggal di organisasi itu karena dia membutuhkan organisasi tersebut.
- 2) Komitmen efektif (*affective commitment*) terjadi apabila karyawan ingin menjadi bagian dari organisasi karena adanya ikatan emosional (*emotional attachment*) atau psikologis terhadap organisasi.
- 3) Komitmen normatif (*normative commitment*) timbul dari nilai-nilai diri karyawan. Karyawan bertahan menjadi anggota suatu organisasi karena memiliki kesadaran bahwa komitmen terhadap organisasi merupakan hal yang memang seharusnya dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi merupakan suatu pembedaan sikap mental individu yang berkaitan dengan tingkat loyalitasnya terhadap organisasi maupun perusahaan tempat individu tersebut bekerja. Pegawai yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan menaati aturan-aturan yang ada dalam perusahaan sehingga akan dapat menurunkan tingkat terjadinya kecurangan (*fraud*)

7) *Fraud* di Sektor Pemerintahan

Fraud yang sering terjadi di sektor pemerintahan adalah korupsi. Secara umum korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan pemilik untuk kepentingan pribadi. Korupsi pada level pemerintahan daerah adalah dari sisi penerimaan, pemerasan uang suap, pemberian perlindungan, pencurian barang-barang publik untuk kepentingan pribadi (Adinda, 2015).

Tuanakotta (2010) mendefinisikan bahwa “Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang pejabat untuk keuntungan pribadi”. Menurut *Transparency International* dalam Sahetapy (2013), “Korupsi adalah perilaku pejabat publik maupun politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka”.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa pengertian korupsi mencakup perbuatan melawan hukum, memperkaya diri, yang merugikan keuangan/perekonomian negara (pasal 2), menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara (pasal 3),

termasuk juga penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, gratifikasi.

Menurut Sahetapy (2013), “Korupsi sudah mewabah di Indonesia, merajalela di hampir seluruh instansi publik, seluruh tingkatan di pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Hampir tanpa rasa malu lagi apabila yang bersangkutan tersangkut kasus korupsi”. Bahkan pihak swasta/non pemerintah turut andil dan bekerja sama dengan pegawai pemerintah dalam tindak korupsi. Skandal korupsi di Indonesia bahkan sudah dianggap hal yang biasa. Kasus korupsi di instansi pemerintah tidak hanya melibatkan orang-orang yang mempunyai jabatan tinggi, tetapi juga orang-orang yang berada di bawahnya, baik di pemerintah pusat maupun daerah. Tindak korupsi yang sering dilakukan antara lain penyuapan, manipulasi laporan keuangan, penghilangan/perusakan bukti dokumen, dan *mark-up* yang merugikan keuangan negara. Tindakan *fraud* ini biasanya dipicu oleh adanya kesempatan untuk melakukan penyelewengan.

Skema *fraud* yang terjadi di entitas pemerintah cukup banyak dan beragam, dari sumber BPKP dalam Najahningrum (2013) menjabarkan secara rinci tindak kecurangan dalam APBN maupun APBD, dari segi pengeluaran maupun pemasukan. Rangkumannya adalah sebagai berikut:

Dari segi penerimaan:

- 1) Rendahnya anggaran penerimaan pajak, PBB, Bea Cukai, retribusi dan pajak lainnya dibanding potensi yang tersedia.
- 2) Manipulasi restitusi pajak.
- 3) Laporan SPT pajak bulanan maupun tahunan yang tidak sesuai dengan potensi

pajak yang sesungguhnya.

- 4) Kesalahan pengenaan tarif pajak maupun bea
- 5) Pembebasan pajak atas bahan baku impor tujuan ekspor tidak sesuai data sesungguhnya.
- 6) Perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat/daerah memperkecil data volume produksi pertambangan atau hasil alam.
- 7) Kontrak pembagian hasil atas tambang yang merugikan negara.
- 8) Penjualan aset pemerintah tidak berdasar harga wajar atau harga pasar.
- 9) Penerimaan yang seharusnya masuk ke rekening kas negara, namun masuk ke rekening atas nama pejabat atau perorangan, meskipun pejabat tersebut pimpinan instansi yang bersangkutan, namun cara ini berpotensi merugikan negara.

Dari segi pengeluaran:

- 1) Pengeluaran belanja/jasa atau perjalanan dinas barang fiktif.
- 2) Pembayaran ganda pejabat atau pegawai yang diperbantukan.
- 3) Penggelembungan (*mark-up*) harga, atau harga patokan terlalu mahal dibandingkan harga pasar.
- 4) Pelaksanaan sistem tender, penunjukan rekanan dan atau konsultan, persyaratan kualifikasi, dan lain-lain tidak sesuai standar prosedur, atau sesuai prosedur tetapi hanya memenuhi persyaratan formalitas.
- 5) Pekerjaan atau barang yang dihasilkan tidak sesuai spesifikasi.
- 6) Program bantuan sosial atau penanggulangan bencana yang salah sasaran.

Biaya yang terlalu tinggi pada penunjukan konsultan keuangan, akuntan, *underwriter*, dan penggunaan tenaga profesional lainnya terkait dengan program

pemerintah atau BUMN.

2.2 Penulisan Sebelumnya

Penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penulisan Sebelumnya

No	Nama	Judul	Variabel Penelitian	Model Penelitian	Hasil Penelitian
1	Pramudita (2013)	“Analisis <i>Fraud</i> di Sektor Pemerintahan Kota Salatiga”.	Persepsi kesesuaian kompensasi (X1), penegakan hukum (X2), komitmen organisasi (X3) dan <i>Fraud</i> (Y).	Menggunakan analisis data dengan analisis <i>full model Structural Equation Modeling (SEM)</i> .	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara gaya Kepemimpinan, keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, budaya etis organisasi dengan <i>fraud</i> di sektor pemerintahan, tidak terdapat pengaruh antara komitmen organisasi, penegakan hukum dengan <i>fraud</i> di sektor pemerintahan.
2	Sulastri & Simanjuntak Binsar (2014)	“ <i>Fraud</i> pada sektor pemerintah berdasarkan Faktor keadilan kompensasi, sistem pengendalian internal, dan etika organisasi pemerintah (studi empiris dinas pemerintah provinsi DKI Jakarta)”.	Persepsi kesesuaian kompensasi (X1), penegakan hukum (X2), komitmen organisasi (X3) dan Kecurangan Laporan keuangan (Y).	Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan variabel keadilan kompensasi dan system pengendalian internal memiliki pengaruh negatif terhadap <i>fraud</i> di sektor pemerintahan. Variabel etika organisasi tidak memiliki pengaruh terhadap <i>fraud</i> di sektor pemerintahan.
3	Adinda & Ikhsan (2015)	“Faktor yang Mempengaruhi terjadinya Kecurangan (<i>Fraud</i>) di Sektor	Persepsi kesesuaian kompensasi (X1), penegakan hukum (X2), komitmen organisasi (X3)	Analisis <i>full model Structural Equation Modeling (SEM)</i> .	Hasil penelitian menunjukkan pengaruh negatif antara keefektifan pengendalian internal, kultur organisasi,

		Pemerintahan Kabupaten Klaten”.	dan <i>Fraud</i> (Y).		keadilan prosedural, dan komitmen organisasi dengan kecurangan (<i>fraud</i>) di sektor pemerintahan, terdapat pengaruh positif antara keadilan distributif dengan kecurangan (<i>fraud</i>) di sektor pemerintahan, tidak terdapat pengaruh antara kesesuaian kompensasi dan penegakan peraturan dengan kecurangan (<i>fraud</i>) di sektor Pemerintahan.
4	Mustika, Hastuti, Heriningsih (2017)	“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (Fraud): Persepsi Pegawai Dinas Kabupaten Way Kanan Lampung”.	Persepsi kesesuaian kompensasi (X1), penegakan hukum (X2), komitmen organisasi (X3) dan <i>Fraud</i> (Y).	Analisis Regresi Linear Berganda	Asimetri informasi, keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (<i>fraud</i>). Terdapat pengaruh negatif penegakan peraturan terhadap kecenderungan (<i>fraud</i>). Terdapat pengaruh positif perilaku tidak etis terhadap kecenderungan (<i>fraud</i>).
5	Adebisi, Gbegi (2015)	“ <i>Analysis Of Fraud Detection And Prevention Strategies In The Nigerian Public Sector</i> ”.	Penegakan Hukum (X1), Komitmen Organisasi (X2), Kesesuaian Kompensasi (X3) dan Kecurangan Laporan Keuangan (Y)	Analisis regresi Linear Berganda	Terdapat pengaruh positif dan signifikan hubungan antara kebijakan manajemen terhadap fraud di sektor publik Nigeria

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan sintesa dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambarann sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan. Kerangka pemikiran dapat disajikan dalam bentuk bagan, deskripsi kualitatif, dan atau gabungan keduanya.

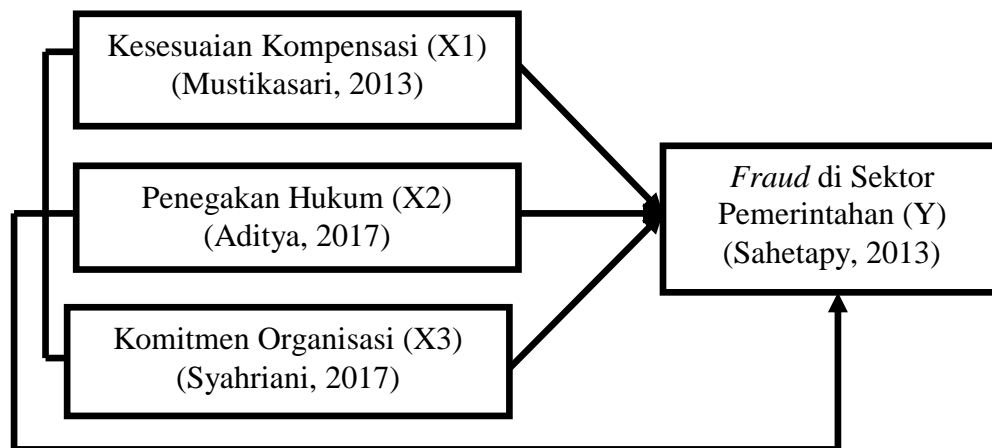
Sahetapy (2013), “Korupsi adalah perilaku pejabat publik maupun politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka”.

Mustikasari (2013) menyatakan bahwa, “Kesesuaian kompensasi adalah pendapat pegawai tentang yang telah dipertimbangkan sebagai sesuatu yang sebanding dengan kata lain bahwa kesesuaian kompensasi merupakan kecocokan dan kepuasan karyawan/pegawai/pekerja atas apa yang diberikan instansi kepada mereka baik berupa upah perjam maupun gaji secara periodik sebagai balasan dari pekerjaan yang telah dilaksanakan. Kecenderungan kecurangan *fraud* yang terjadi di instansi atau organisasi dimotivasi karena adanya keinginan individu untuk memaksimalkan keuntungan pribadi. Motivasi tindakan tersebut karena adanya ketidakpuasan individu atas imbalan yang mereka peroleh dari pekerjaan yang mereka kerjakan. Dengan adanya kesesuaian kompensasi yang sesuai dengan yang diharapkan dapat membuat individu merasa tercukupi sehingga individu tidak melakukan tindakan yang merugikan instansi atau organisasi termasuk melakukan tindak kecurangan di sektor pemerintahan”.

Aditya (2013) menyatakan bahwa, “Dalam suatu instansi atau organisasi, apabila penegakan hukum kurang efektif akan membuka peluang bagi pegawai untuk melakukan pelanggaran yang bisa saja mengarah pada perilaku menyimpang, salah satunya dengan melakukan kecurangan”. Kecurangan secara umum merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain. Penegakan hukum merupakan bentuk tindakan nyata oleh subjek hukum kepada hukum yang berlaku yaitu dengan menaati hukum yang ada di suatu negara. Kebanyakan masyarakat mengerti tentang hukum, tetapi tidak mematuinya. Jadi dalam hal ini dibutuhkan kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat akan timbul bila penegakan hukum dapat berjalan dengan semestinya.

Syahriani (2017) menyatakan bahwa, “Komitmen organisasi merupakan suatu kesetiaan atau loyalitas pegawai terhadap instansi tempat bekerja. Komitmen tersebut dapat terwujud apabila individu dalam organisasi menjalankan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam organisasi. Selain itu, komitmen organisasi juga dapat mengarahkan seorang pegawai dalam melakukan berbagai tindakan”.

Berdasarkan penjelasan diatas, kerangka konseptual pada penelitian ini adalah:



Gambar 2.3 Kerangka Konseptual
Sumber: Diolah Peneliti (2021)

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan kerangka konseptual diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap *fraud* di sektor Pemerintahan SKPD Kota Binjai.
2. Penegakan hukum berpengaruh terhadap *fraud* di sektor Pemerintahan SKPD Kota Binjai.
3. Komitmen organisasi berpengaruh terhadap *fraud* di sektor Pemerintahan SKPD Kota Binjai.
4. Kesesuaian kompensasi, penegakan hukum dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap *fraud* di sektor Pemerintahan SKPD Kota Binjai.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pendekatan penelitian maka penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif. Kasmir (2012) menyatakan, “Penelitian asosiatif/kuantitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui derajat hubungan dan pola/bentuk pengaruh antar dua variabel atau lebih, dimana dengan penelitian ini maka akan dibangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. Penelitian ini membahas pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dimana, kesesuaian kompensasi, penegakan hukum dan komitmen organisasi sebagai variabel bebas sedangkan fraud di sektor Pemerintahan sebagai variabel terikat”.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Menurut Ghozali (2016), “Penelitian ini adalah data dokumenter. Data dokumenter adalah data yang memuat apa dan kapan suatu kejadian atau transaksi, serta siapa yang terlibat dalam suatu kejadian. Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Kota Binjai”.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai dari September 2020 sampai dengan selesai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun								
		Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
		2020	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2021	2021
1	Pengajuan Judul									
2	Penyusunan Proposal									
3	Seminar Proposal									
4	Perbaikan/Acc Proposal									
5	Pengolahan Data									
6	Penyusunan Skripsi									
7	Bimbingan Skripsi									
8	Sidang Meja Hijau									

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

3.3 Populasi Dan Sampel/Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Populasi

Sugiyono (2010) menyatakan bahwa, “Populasi adalah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasi objek dalam penelitian ini mencakup pegawai tetap/pegawai negeri sipil (PNS) yang berkerja di SKPD (Satuan kerja Perangkat daerah) Kota Binjai.

3.3.2 Sampel

Sampel pada penelitian ini adalah pegawai tetap/pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kota Binjai. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* adalah teknik pemilihan sampel dimana tidak dilakukan generalisasi terhadap sampel yang diambil. Teknik *purposive sampling* lebih digunakan pada penelitian-penelitian yang lebih mengutamakan tujuan penelitian dari

pada sifat populasi dalam menentukan sampel penelitian. Metode *purposive sampling* dengan kriteria yaitu pegawai tetap/pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kota Binjai.

Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Binjai.
- b. Memiliki Masa Kerja sekurang-kurangnya 1 tahun pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang bersangkutan.
- c. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada bidang penanggungjawab anggaran, bendahara permasukan dan bendahara pengeluaran.

Tabel 3.2 Sampel Penelitian

No	Nama Dinas Kota Binjai	Kriteria			Koordinator Keuangan
		a	b	c	
1	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	✓	✓	✓	3
2	Dinas Lingkungan Hidup	✓	✓	✓	3
3	Dinas Sosial	✓	✓	✓	3
4	Dinas Pendapatan Daerah	✓	✓	✓	3
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	✓	✓	✓	3
6	Dinas Tenaga Kerja	✓	✓	✓	3
7	Dinas Komunaksi & informatika	✓	✓	✓	3
8	Dinas Perhubungan Kota Binjai	✓	✓	✓	3
9	Dinas Pemuda dan Olahraga	✓	✓	✓	3
10	Dinas Pendidikan	✓	✓	✓	3
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	✓	✓	✓	3
12	Dinas Kesehatan	✓	✓	✓	3
13	Dinas Pertanian dan Perikanan	✓	✓	✓	3
14	Dinas Bina Marga	✓	✓	✓	3
15	Dinas Perpustakaan	✓	✓	✓	3
16	Dinas koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	✓	✓	✓	3
17	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	✓	✓	✓	3
18	Badan Kepegawaian Daerah	✓	✓	✓	3
19	Badan Pertanahan Nasional	✓	✓	✓	3
20	Satuan Polisi Pamong Praja	✓	✓	✓	3
Jumlah					60

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

3.3.3 Jenis dan Sumber Data

Ghozali (2016) menyatakan, Teknik pengumpulan data dilakukan adalah dengan cara sebagai berikut:

a. Jenis data

1) Data Kuantitatif

Data yang dihitung berupa angka-angka yang diperoleh dari SKPD Pemerintah Kota Binjai yang dapat dihitung, seperti jumlah kompensasi dan data-data lainnya yang menunjang penelitian.

2) Data Kualitatif

Data yang diperoleh dari SKPD Pemerintah Kota Binjai, seperti gambaran umum organisasi perangkat daerah, hasil kuesioner dan informasi-informasi yang diperoleh dari pihak lain yang menunjang.

b. Sumber Data

Sumber data yang dikumpulkan penulis dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu:

1) Data Primer

Data yang diperoleh melalui pengamatan dan wawancara langsung terhadap responden yang dalam hal ini mahasiswa.

2) Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang ada di setiap SKPD Kota Binjai tersebut, dan hasil penelitian kepustakaan dan dari SKPD yang terkait.

3.4 Definisi Operasional Dan Variabel Penelitian

Ghozali (2016) menyatakan, “Operasionalisasi variabel adalah suatu pemecahan variabel yang terkandung menjadi bagian yang terkecil sehingga dapat diketahui klasifikasi ukurannya. Operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: *fraud* di sektor Pemerintahan (Y), kesesuaian kompensasi (X1), penegakan hukum (X2) dan komitmen organisasi (X3)”.

3.4.1 Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas yang sifatnya tidak berdiri sendiri serta menjadi perhatian utama peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah *fraud* di sektor Pemerintahan.

3.4.2 Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas yaitu variabel yang dapat mempengaruhi variabel terikat, baik itu secara positif atau negatif, serta sifatnya dapat berdiri sendiri. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah kesesuaian kompensasi, penegakan hukum dan komitmen organisasi. Berikut adalah penjelasan definisi operasional variabel sebagai berikut:

Tabel 3.3 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Devinisi Variabel	Indikator	Skala
<i>Fraud</i> di sektor Pemerintahan (Y)	<i>Fraud</i> adalah sebagai satu jenis tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh sesuatu dengan cara menipu (BPK RI, 2007).	1. Kecurangan pelaporan 2. Penyalahgunaan aset 3. Korupsi 4. Kesesuaian kompensasi 5. Penegakan hukum 6. Komitmen organisasi 7. <i>Fraud</i> di sektor Pemerintahan (Syahrhani, 2017)	<i>Likert</i>
Kesesuaian Kompensasi (X1)	Kompensasi atau gaji adalah salah satu hal yang penting bagi setiap karyawan atau pegawai yang bekerja dalam suatu perusahaan, karena dengan gaji yang diperoleh seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut (Faisal, 2013).	1. Faktor Pemerintah 2. Penawaran Bersama antara perusahaan dan pegawai 3. Standar dan biaya hidup pegawai 4. Ukuran perbandingan upah 5. Permintaan dan persediaan 6. Kemampuan membayar (Mangkunegara, 2010)	<i>Likert</i>
Penegakan Hukum (X2)	Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Asshiddiqie 2012).	1. Substansi perundang-undangan 2. Struktur organisasi pengadaan dan penegakannya 3. Budaya (Lawrence Friedman, 1975)	<i>Likert</i>
Komitmen Organisasi (X3)	Komitmen organisasi adalah individu yang memiliki keinginan untuk berbuat etis terhadap organisasinya dengan tujuan agar terciptanya tujuan yang diinginkan tidak lain semata-mata untuk kepentingan organisasi tersebut (Najahningrum, 2013)	1. Komitmen kontinu 2. Komitmen efektif 3. Komitmen normatif (Ikhsan & Ishak, 2015)	<i>Likert</i>

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua cara, yaitu penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Berikut penjelasannya:

1. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Peneliti memperoleh informasi yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti melalui buku, jurnal, skripsi, tesis, website resmi, dan perangkat lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data utama penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan, penelitian memperoleh data langsung dari pihak pertama (primer). Data primer merupakan sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, tidak melalui perantara. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode *survey* yaitu dengan cara mengirimkan kusioner kepada kantor SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang berada di Kota Binjai secara langsung, agar dapat diterima langsung oleh subjek penelitian yaitu pegawai sub bagian keuangan. Data primer diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari pegawai yang bekerja di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sub bagian keuangan Pemerintah Daerah Kota Binjai sebagai responden dalam penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Ghozali (2016), “Analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan model regresi linear berganda yang bertujuan untuk menjelaskan kekuatan dan memberikan pengaruh beberapa variabel independen (X) terhadap suatu variabel dependen (Y). Untuk mendapatkan perhitungan yang tepat, peneliti menggunakan

program komputer yang khusus untuk membantu pengelolaan statistik, yaitu program *SPSS (Statistical Packages for Social Sciences)*”.

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2012), “Analisis deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kesesuaian kompensasi, penegakan hukum dan komitmen organisasi terhadap *fraud* di sektor pemerintahan”.

3.6.2 Uji Kualitas Data

1) Uji Validitas

Menurut Ghozali (2015:103), “Uji ini digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dan kuesioner mampu untuk mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut”.

2) Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2016), “Mengemukakan bahwa uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai $\bar{\alpha} > 0,60$ ”.

Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *one shot* atau pengukuran sekali saja. Disini pengukuran hanya sekali saja dan kemudian hasilnya

dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha* ($\bar{\alpha}$).

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Menurut Ghozali (2016), “Salah satu syarat yang mendasari penggunaan model regresi adalah dipenuhinya semua asumsi klasik, agar pengujian lebih efisien”.

Uji asumsi klasik yang digunakan adalah:

- 1) Memiliki Distribusi Normal.
- 2) Tidak terjadi Multikolinieritas antar variabel independen.
- 3) Tidak terjadi Heteroskedastisitas atau varian variabel pengganggu yang konstan (Homoskedastisitas).
- 4) Tidak terjadi autokorelasi antar residual setiap variabel independen.

1) Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi, variabel dependen, variabel independen atau kedua-duanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Pada uji normalitas penelitian ini, digunakan metode Grafik *Normality P-Plot*, *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, dan Histogram.

Dalam uji Grafik *Normality Probability Plot*, ketentuan yang digunakan adalah:

- a) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b) Jika data menyebar jauh dari diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Menurut Ghozali, (2016), Jika data tidak normal, ada beberapa cara mengubah model regresi menjadi normal adalah:

- a) Lakukan transformasi data, misalnya mengubah data menjadi bentuk logaritma (Log) atau natural (ln).
- b) Menambah jumlah data.
- c) Menghilangkan data yang dianggap sebagai penyebab tidak normalnya data.
- d) Menerima data apa adanya.

Pemilihan metode ini didasarkan bahwa *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* merupakan metode yang umum digunakan untuk menguji normalitas data. Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah sampel yang digunakan berdistribusi normal atau tidak, dengan membuat hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Data terdistribusi normal

H_a : Data terdistribusi tidak normal

Jika $\sigma > 0,05$, maka H_a ditolak dan H_0 diterima.

Jika $\sigma < 0,05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak.

Menurut Ghozali (2016), “Pengujian dengan model histogram memiliki ketentuannya bahwa data normal berbentuk lonceng. Data yang baik adalah data yang memiliki pola distribusi normal”.

2) Uji Multikolinieritas

Menurut Santoso (2016), “Tujuan uji multikolinieritas adalah menguji apakah pada sebuah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen”. Jika dalam model regresi terjadi korelasi, maka terdapat masalah multikolinieritas. Metode yang digunakan untuk mendeteksi multikolinieritas dalam penelitian ini

adalah *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Batas *tolerance value* ≤ 0.1 dan $VIF \geq 10$ ".

a) H_0 : *Tolerance* $> 0,10$ dan $VIF < 10$, tidak terdapat multikolinearitas.

b) H_1 : *Tolerance* $< 0,10$ dan $VIF > 10$, terdapat multikolinearitas.

3) Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2016), "Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual atau pengamatan ke pengamatan lain. Jika dalam satu pengamatan ke pengamatan lainnya memiliki variabel tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas". Ada beberapa cara untuk mendeteksi atau tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat grafik *Scatter Plot* antara nilai prediksi variabel terkait yaitu ZPRED dengan nilai residualnya SRESID lewat program SPSS dengan pengambilan keputusan.

a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk suatu pola yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas.

b) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka terjadi homoskedastisitas.

3.6.4 Analisis regresi Linear Berganda

Menurut Ghozali (2016), Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh beberapa variabel independen (X) terhadap satu variabel dependen (Y) yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana:

Y = *Fraud* di Sektor Pemerintahan

X1 = Kesesuaian Kompensasi

X2 = Penegakan Hukum

X3 = Komitmen Organisasi

a = Konstanta, besar nilai Y jika X=0

b_1 - b_2 = Koefisien arah regresi, nilai X berubah apabila nilai Y berubah

e = *Standard Error*

3.6.5 Uji Hipotesis

Menurut Ghozali (2016), “Uji hipotesis ini digunakan untuk menguji adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen baik secara simultan maupun parsial, yang menggunakan uji t dan uji F”.

a. Uji t (Uji Parsial)

Menurut Ghozali (2016), “Untuk menentukan tingkat signifikan secara parsial antara masing-masing variabel bebas dengan variabel tak bebas, maka hipotesis harus diuji dengan uji – t pada taraf signifikan sebesar $\alpha = 5\%$ secara dua arah (*two tail*)”. Uji statistik t yang digunakan untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh antara masing-masing variabel independen (X) dan variabel dependen (Y).

Setelah dilakukan uji hipotesis (uji t) maka kriteria yang ditetapkan yaitu dengan membandingkan t tabel dengan t hitung yang diperoleh berdasarkan tingkat signifikan (α) tertentu dengan derajat kebebasan (df) = $n-k$.

Kriteria untuk mengambil keputusan adalah sebagai berikut:

- 1) Jika angka signifikan $\geq 0,05$, maka H_0 diterima.
- 2) Jika angka signifikan $\leq 0,05$, maka H_0 ditolak.

Apabila H_0 diterima, maka hal ini menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen dan sebaliknya apabila H_0 ditolak, maka variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

b. Uji F (Uji Simultan)

Menurut Sugiyono (2010), “Pengujian secara simultan dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen mampu menjelaskan variabel dependennya, maka dilakukan uji hipotesis secara simultan dengan menggunakan uji statistik F”. Dirumuskan sebagai berikut:

Setelah mendapat F_{hitung} ini, kemudian dibandingkan dengan nilai F_{tabel} dengan nilai signifikan sebesar 0,05 atau 5%, artinya kemungkinan besar dari hasil penarikan kesimpulan memiliki probabilitas 95% atau kolerasi kesalahan sebesar 5% yang mana akan diperoleh suatu hipotesis dengan syarat:

1. Jika angka signifikan $\geq 0,05$, maka H_0 diterima.
2. Jika angka signifikan $\leq 0,05$, maka H_0 ditolak.

3.6.6 Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Santoso (2012) menyatakan bahwa, “Koefisien determinasi (R^2) dari hasil regresi berganda menunjukkan seberapa besar variabel dependen bias dijelaskan oleh variabel-variabel independen. Dalam penelitian ini menggunakan koefisien determinasi (*Adjusted R²*) dapat diketahui derajat ketepatan dari analisis linear berganda menunjukkan seberapa jauh variabel bebas mampu menjelaskan pengaruh terhadap variabel terikat”.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kota Binjai

Kota Binjai adalah salah satu kota penting di Sumatera Utara. Dikatakan penting karena Binjai terletak di daerah strategis dimana Kota Binjai sendiri merupakan pintu gerbang Kota Medan menuju Provinsi Aceh. Letaknya kurang lebih 22 kilometer di sebelah Kota Medan. Sebelum berstatus Kotamadya, Binjai adalah Ibukota Kabupaten Langkat yang kemudian dipindahkan ke Stabat. Binjai berbatasan langsung dengan Kabupaten Langkat di sebelah Barat dan Utara serta Kabupaten Deli Serdang di sebelah Timur dan Selatan. Kota Binjai juga merupakan salah satu Kotamadya di Sumatera Utara yang mempunyai catatan sejarah yang berguna dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pendidikan.

Kota Binjai secara historis terletak diantara dua Kesultanan Melayu yang besar, yaitu Kesultanan Langkat dan Kesultanan Deli. Luasnya wilayah kekuasaan kedua kesultanan ini berdampak pada perkembangan wilayah-wilayah lain di sekitarnya. Kota Binjai sendiri mengalami perkembangan karena bagian dari luasnya wilayah kekuasaan kesultanan langkat.

Gambar 4.1 Logo Pemerintah Kota Binjai



a. Visi Kota Binjai

- 1) KOTA CERDAS (*SMART CITY*) bermakna bahwa pembangunan Kota Binjai dalam 5 tahun kedepan akan dibangun dalam totalitas perwujudan Kota Cerdas yang melingkupi Pemerintahan yang Cerdas (*Smart Governance*), Sumber Daya Manusia yang Cerdas (*Smart People*), Infrastruktur Pendukung Mobilitas Masyarakat yang produktif (*Smart Mobility*), Perekonomian tinggi dengan dukungan pengelolaan Sumber Daya Alam berwawasan lingkungan (*Smart Economy & Smart Environment*).
- 2) KOTA LAYAK HUNI (*SMART LIVING*) mengandung pengertian bahwa optimalisasi pembangunan aspek fisik fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang dan lain-lain dan aspek non fisik (interaksi sosial, ekonomi, hukum dan politik) yang terwujud melalui indikator:
 - a) tersedianya berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian yang layak, air bersih dan listrik);
 - b) tersedianya berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial (transportasi publik, taman kota, fasilitas ibadah dan kesehatan);
 - c) tersedianya ruang dan tempat publik untuk bersosialisasi dan berinteraksi, keamanan dengan bebas dari rasa takut;
 - d) mendukung fungsi ekonomi, sosial, budaya dan
 - e) sanitasi lingkungan yang baik serta keindahan lingkungan fisik.
- 3) BERDAYA SAING mengandung pengertian bahwa kemajuan Kota Binjai diarahkan kepada peningkatan daya saing pada sektor permukiman, jasa, perdagangan dan industri dengan target capaian berada diatas capaian Provinsi Sumatera Utara dan meningkatnya investasi.

- 4) BERWAWASAN LINGKUNGAN mengandung pengertian bahwa pembangunan kedepan diarahkan dalam tindak lanjut pembangunan Kota Binjai *Eco-Green City* yang telah dimulai sejak 5 tahun terakhir.
- 5) SEJAHTERA mengandung pengertian terwujudnya peningkatan pendapatan, peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, penurunan kesenjangan pendapatan masyarakat, penurunan angka kemiskinan, penyediaan dan perluasan kesempatan kerja, dengan capaian yang lebih baik dari Provinsi Sumatera Utara.

b. Misi Kota Binjai

Upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka tercapainya Visi tersebut diwujudkan melalui Misi sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan pemerintahan yang cerdas (*Smart Governance*) melalui birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan kota yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
- 2) Membangun sumber daya manusia berkualitas (*Smart People*) dengan kualifikasi Pintar, Sehat, Produktif dan Sejahtera;
- 3) Mengoptimalkan produktifitas pergerakan masyarakat (*Smart Mobility*) melalui kualitas infrastruktur daerah yang mampu meningkatkan fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat;
- 4) Meningkatkan perekonomian kota melalui pengelolaan SDA berkelanjutan dan pengembangan SDM yang Terampil, Inovatif, Kreatif dan Produktif (*Smart Economy dan Smart Environment*);
- 5) Meningkatkan kualitas standar hidup (*Smart Living*) dalam aspek kelayakan, kesejahteraan, keadilan dan kenyamanan.

4.1.2 Karakteristik Responden

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Binjai. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 60 responden. Responden dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) koordinator keuangan. Dari kuisisioner yang disebarkan maka diperoleh hasil karakteristik responden sebagai berikut:

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Keterangan	Jumlah	Presentase
1.	Laki-laki	26	43,3 %
2.	Perempuan	34	56,7 %
Jumlah		60	100 %

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

Berdasarkan tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa jumlah responden berdasarkan jenis kelamin yang terbanyak adalah berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 34 responden (56,7%), sedangkan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 26 responden (34%).

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Keterangan	Jumlah	Presentase
1	S1	39	65 %
2	S2	21	35 %
Jumlah		60	100 %

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa sebagian besar pendidikan responden adalah S1 (65%) dengan jumlah responden sebanyak 39 responden dan yang memiliki pendidikan S2 (35%) dengan jumlah responden sebanyak 21 responden.

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Keterangan	Jumlah	Presentase
1	26 s.d 30 Tahun	12	20 %
2	31 s.d 40 Tahun	32	53,3 %
3	> 40 Tahun	16	26,7 %
Jumlah		60	100 %

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukkan bahwa usia pegawai yang berusia 26-30 tahun (20%) yaitu sebanyak 12 pegawai. Kemudian usia 31-40 tahun (53,3%) sebanyak 32 pegawai, dan usia diatas 40 tahun (26,7%) sebanyak 16 orang pegawai. Usia 31-40 tahun merupakan usia produktif yang memiliki pengalaman kerja yang cukup, untuk memenuhi pencapaian target pekerjaan yang telah ditetapkan organisasi.

Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

No	Keterangan	Jumlah	Presentase
1	1-10 Tahun	32	53,3 %
2	11-20 Tahun	15	25 %
3	>20 Tahun	13	21,6 %
Jumlah		60	100 %

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa, 32 responden atau sebanyak 53,3% mempunyai masa kerja 1-10 tahun, dimana mayoritas dari para pegawai berada pada masa kerja yang produktif.

4.1.3 Uji Kualitas Data

a) Uji Validitas

Untuk mendapatkan data primer peneliti melakukan penyebaran kuisisioner kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagian keuangan yang bekerja di Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD), sebelum kuisisioner disebarkan kepada 40 responden, penulis terlebih dahulu melakukan *try out* kepada 20 orang responden dengan memberikan 30 butir pertanyaan yang dibagi menjadi 4 variabel yaitu

Fraud di Sektor Pemerintahan (Y), Kesesuaian Kompensasi (X1), Penegakan Hkum (X2) dan Komitmen Organisasi (X3) untuk menguji valid dan reliabelnya seluruh pernyataan tersebut. Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Kesesuaian Kompensasi (X1)

No	Butir Pernyataan	R _{hitung}	R _{tabel}	Keterangan
1	X1.1	0.611	0.210	Valid
2	X1.2	0.415	0.210	Valid
3	X1.3	0.630	0.210	Valid
4	X1.4	0.547	0.210	Valid
5	X1.5	0.646	0.210	Valid
6	X1.6	0.657	0.210	Valid

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

Jika r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} dan nilai positif maka butir pernyataan atau indikator tersebut dinyatakan valid. Jika $r_{hitung} >$ dari r_{tabel} (pada taraf signifikansi 5%) maka pernyataan tersebut dinyatakan valid.

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Penegakan Hukum (X2)

No	Butir Pernyataan	R _{hitung}	R _{tabel}	Keterangan
1	X2.1	0.650	0.210	Valid
2	X2.2	0.637	0.210	Valid
3	X2.3	0.648	0.210	Valid
4	X2.4	0.678	0.210	Valid
5	X2.5	0.626	0.210	Valid

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

Jika r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} dan nilai positif maka butir pernyataan atau indikator tersebut dinyatakan valid. Jika $r_{hitung} >$ dari r_{tabel} (pada taraf signifikansi 5%) maka pernyataan tersebut dinyatakan valid.

Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Komitmen Organisasi (X3)

No	Butir Pernyataan	R _{hitung}	R _{tabel}	Keterangan
1	X3.1	0.573	0.210	Valid
2	X3.2	0.429	0.210	Valid
3	X3.3	0.531	0.210	Valid
4	X3.4	0.668	0.210	Valid
5	X3.5	0.710	0.210	Valid
6	X3.6	0.629	0.210	Valid
7	X3.7	0.650	0.210	Valid
8	X3.8	0.514	0.210	Valid
9	X3.9	0.650	0.210	Valid

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

Jika r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} dan nilai positif maka butir pernyataan atau indikator tersebut dinyatakan valid. Jika $r_{hitung} >$ dari r_{tabel} (pada taraf signifikansi 5%) maka pernyataan tersebut dinyatakan valid.

Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas *Fraud* Sektor Pemerintahan (Y)

No	Butir Pernyataan	Rhitung	Rtabel	Keterangan
1	Y.1	0.701	0.210	Valid
2	Y.2	0.627	0.210	Valid
3	Y.3	0.730	0.210	Valid
4	Y.4	0.675	0.210	Valid
5	Y.5	0.531	0.210	Valid
6	Y.6	0.531	0.210	Valid
7	Y.7	0.668	0.210	Valid
8	Y.8	0.710	0.210	Valid
9	Y.9	0.629	0.210	Valid

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

Jika r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} dan nilai positif maka butir pernyataan atau indikator tersebut dinyatakan valid. Jika $r_{hitung} >$ dari r_{tabel} (pada taraf signifikansi 5%) maka pernyataan tersebut dinyatakan valid.

b) Uji Reliabilitas

Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *one shot* atau pengukuran sekali saja. Disini pengukuran hanya sekali saja dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha* ($\bar{\alpha}$) (Ghozali, 2015).

Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i> ($\bar{\alpha}$)	N Of Item
Kesesuaian Kompensasi	0.820	6
Penegakan Hukum	0.937	5
Komitmen Organisasi	0.855	9
<i>Fraud</i> di Sektir Pemerintahan	0.882	9

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

Berdasarkan hasil tabel 4.9 diatas, diketahui bahwa semua pernyataan dari variabel *fraud* di sektor pemerintahan (Y), kesesuaian kompensasi (X1). Penegakan hukum (X2) dan komitmen organisasi (X3) memiliki nilai *Cronbach*

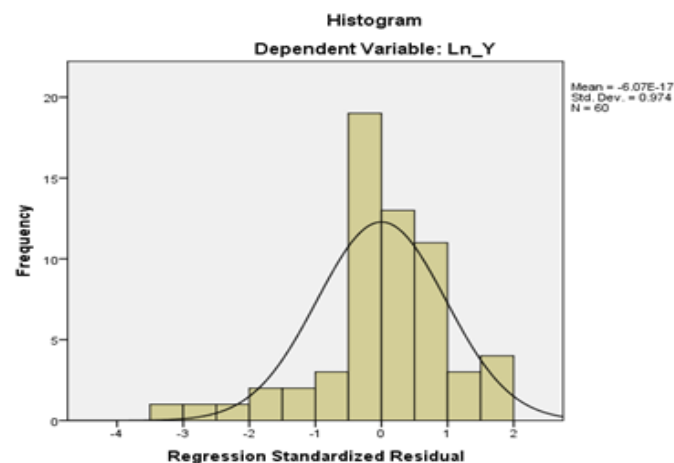
α ($\bar{\alpha}$) yang lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan yang digunakan untuk variabel *fraud* di sektor pemerintahan (Y), kesesuaian kompensasi (X1), penegakan hukum (X2) dan komitmen organisasi (X3) dalam penelitian ini adalah reliabel.

4.1.4 Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2015).

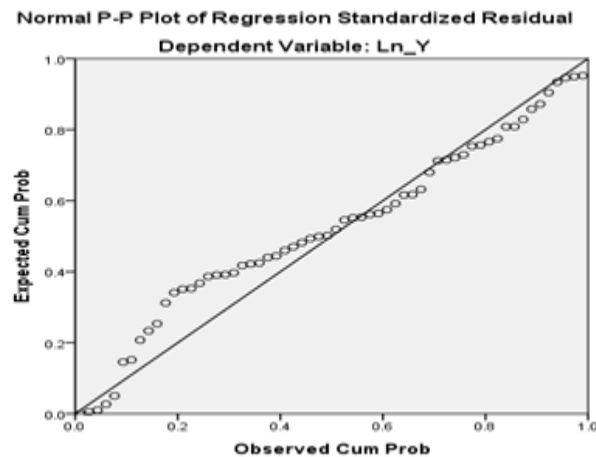
Gambar 4.2 Grafik Histogram



Sumber: Hasil Olahan SPSS (2021)

Berdasarkan gambar grafik histogram diatas dapat terlihat bahwa garis bergerak mengikuti bentuk diagram dsn membentuk lonceng sehingga dapat dikatakan bahwa data berdistribusi secara normal.

Gambar 4.3 Grafik Normality P-plot



Sumber: Hasil Olahan SPSS (2021)

Berdasarkan grafik *normality p-plot* di atas, terlihat bahwa penyebaran data (titik) menyebar diagonal dan mengikuti arah garis diagonal yang berarti bahwa data berdistribusi normal atau model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 4.10 One Sample Kolmogorov Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	1,70174397
Most Extreme Differences	Absolute	0,095
	Positive	0,048
	Negative	-0,095
Test Statistic		0,095
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Hasil Olahan SPSS (2021)

hasil pengujian di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar 0,200. Nilai signifikan yang dapat dilihat pada nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)*, nilai signifikan ini lebih besar dari 0,05. Sehingga berdasarkan uji *Kolmogorov-Smirnov*, data yang digunakan dapat dipastikan telah terdistribusi secara normal karena nilai disignifikan dari residual lebih besar dari 0,05.

b) Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2015), “Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen dalam suatu model”. Selain itu untuk uji ini juga untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika VIF yang di hasilkan diantara 1-10 maka tidak terjadi multikolinieritas. Output nya tampak pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.11 Uji Multikolinieritas

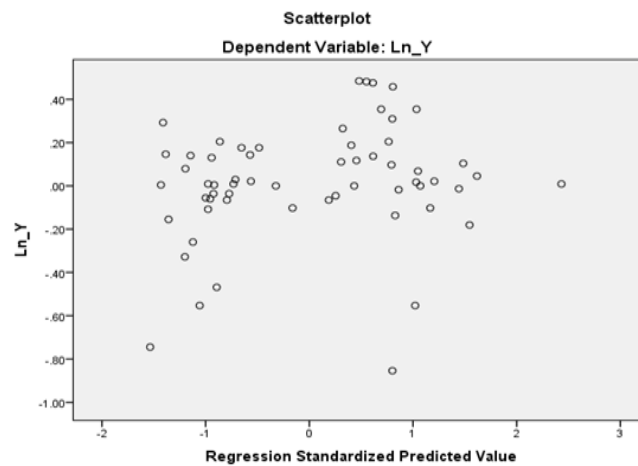
Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Kesesuaian Kompensasi	.897	1.114
	Penegakan Hukum	.897	1.115
	Komitmen Organisasi	.899	1.001
a. Dependent Variable: Fraud_di_Sektor_Pemerintahan			

Sumber: Hasil Olahan SPSS (2021)

c) Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan *variance* residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dengan pola gambar *Scatterplot*, regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas jika:

1. Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0.
2. Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.
3. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
4. Penyebaran titik-titik data tidak berpola.

Gambar 4.4 Grafik Scatterplot

Sumber: Hasil Olahan SPSS (2021)

Pada gambar 4.4 terlihat bahwa titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y dan tidak terlihat pola tertentu. Dengan demikian pada persamaan regresi linear berganda dalam model ini tidak ada gejala atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.1.5 Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Ghozali (2015), “Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini dilakukan untuk meramalkan bagaimana hubungan variabel independen dengan variabel dependen”. Hasil uji regresi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.13 Regresi Linear Berganda Coefficients^a

Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	12.036	4.529	
	Kesesuaian Kompensasi	.408	.121	.422
	Penegakan Hukum	.332	.105	.395
	Komitmen Organisasi	.350	.096	.432

a. Dependent Variable: Fraud_di_Sektor_Pemerintahan

Sumber: Hasil Olahan SPSS (2021)

Dari tabel 4.13 di atas dapat dirumuskan suatu persamaan regresi untuk mengetahui pengaruh kompetensi SDM pemerintah, penerapan sistem akuntansi dan sistem informasi akuntansi sebagai berikut:

$$Y = 12,036 + 0,408 X_1 + 0,332 X_2 + 0,350 X_3$$

Koefisien-koefisien persamaan regresi linear berganda di atas dapat diartikan sebagai berikut:

Tanda-tanda koefisien regresi mencerminkan hubungan antar variabel independen (kesesuaian kompensasi, penegakan hukum dan komitmen organisasi) dengan variabel dependen (*fraud* di sektor pemerintahan) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Binjai. Tanda (+) berarti terdapat hubungan yang positif atau searah antar variabel independen dengan variabel dependen. Sedangkan tanda (-) berarti tidak terdapat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

4.1.6 Uji Hipotesis

1) Uji Parsial (Uji-t)

Ghozali (2015) menjelaskan bahwa, “Uji t-statistik diperlukan untuk melihat nyata tidaknya pengaruh variabel yang dipilih terhadap variabel yang diteliti. Uji t-statistik digunakan untuk menguji pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial”. Dengan menguji satu arah dalam tingkat signifikansi = α dan $df = n - k$ (n =jumlah observasi, k =jumlah parameter) maka hasil pengujian akan menunjukkan:

1. Jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ pada $\alpha 0.05$, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima.
2. Jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ pada $\alpha 0.05$, maka H_1 diterima dan H_0 ditolak.

Tabel 4.14 Uji Statistik Parsial (Uji-t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.036	4.529		2.658	.013
	Kesesuaian Kompensasi	.408	.121	.422	3.842	.000
	Penegakan Hukum	.332	.105	.395	2.659	.010
	Komitmen Organisasi	.350	.096	.432	3.655	.001
a. Dependent Variable: Fraud_di_Sektor_Pemerintahan						

Sumber: Hasil Olahan SPSS (2021)

Tabel 4.14 di atas menunjukkan hasil uji statistik t antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel kesesuaian kompensasi memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3,842 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 dan t_{tabel} sebesar 1,670 dengan $df = 60$ pada taraf 0,05. Tingkat signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 yang berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa variabel kesesuaian kompensasi berpengaruh positif signifikan terhadap *fraud* di sektor pemerintahan.

Variabel penegakan hukum memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,659 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,010 dan t_{tabel} sebesar 1,670 dengan $df = 60$ pada taraf 0,05. Tingkat signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 dan nilai beta yang dihasilkan adalah positif besar 0,332 yang berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa variabel penegakan hukum berpengaruh positif signifikan terhadap *fraud* di sektor pemerintahan.

Variabel komitmen organisasi memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3.655 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 dan t_{tabel} sebesar 1,670 dengan $df = 60$ pada taraf 0,05. Tingkat signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 yang berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa variabel komitmen organisasi

berpengaruh positif signifikan terhadap *fraud* di sektor pemerintahan.

Jadi, berdasarkan hasil pengujian regresi secara parsial pada tabel diatas menunjukkan bahwa variabel kesesuaian kompensasi (X1), penegakan hukum (X2) dan komitmen organisasi (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fraud* di sektor pemerintahan (Y).

2) Uji Simultan (Uji-F)

Secara simultan, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji-F (*F test*). Uji-F dilakukan untuk menguji apakah variabel-variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan membandingkan signifikansi F-hitung dengan ketentuan:

- 1) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada $\alpha 0.05$, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima.
- 2) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada $\alpha 0.05$, maka H_1 diterima dan H_0 ditolak.

Tabel 4.15 Uji Simultan (Uji-F)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	323.038	3	77.494	15.162	.000 ^b
	Residual	65.628	59	5.111		
	Total	388.667	60			

a. Dependent Variable: Fraud_di_Sektor_Pemerintahan
b. Predictors: (Constant), KK, PH, KO

Sumber: Hasil Olahan SPSS (2021)

Setelah uji-F dilakukan, maka diperoleh nilai F_{hitung} dan nilai signifikansi. Nilai F_{hitung} sebesar 14,304 sedangkan F_{tabel} sebesar 2,76 dengan df pembilang = 3, df penyebut = 60 dan taraf signifikan $\alpha = 0.05$ sehingga $F_{hitung} > F_{tabel}$ Dengan demikian maka H_1 ditolak dan H_0 diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara kesesuaian kompensasi (X1), penegakan hukum (X2), dan komitmen organisasi (X3) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *fraud* di sektor pemerintahan (Y). Pada Tabel 4.15 dapat dilihat bahwa tingkat

signifikansi sebesar $0.000 <$ dari taraf yang ditentukan $\alpha = 0.05$ mengindikasikan bahwa X1, X2, dan X3 secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y.

4.1.7 Koefisien Determinasi R^2 (*Adjusted R-Square*)

Nilai koefisien korelasi (R) menunjukkan seberapa besar korelasi atau hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen. Koefisien korelasi dikatakan kuat jika nilai R berada di atas 0.5 dan mendekati nilai 1. Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel dependennya. Nilai *R square* adalah nol sampai dengan satu. Apabila nilai *R square* semakin mendekati satu, maka variabel-variabel independen memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Sebaliknya, semakin kecil nilai *R square*, maka kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen semakin terbatas. Nilai *R square* memiliki kelemahan yaitu nilai *R square* akan meningkat setiap ada penambahan satu variabel independen meskipun variabel independen tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dengan demikian, nilai *adjusted R square* digunakan untuk mengevaluasi mana model regresi terbaik.

Tabel 4.16 Koefisien Determinasi R^2

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.798 ^a	.636	.594	.14803	2.261

a. Predictors: (Constant), KK, PH, KO

Sumber: Hasil Olahan SPSS (2021)

Dilihat dari tabel 4.16 koefisien determinasi (R^2) menunjukkan angka

Adjusted R Square 0,594 atau 59,4% yakni berarti variasi variabel *fraud* di sektor pemerintahan (Y) dapat dijelaskan oleh variabel kesesuaian kompensasi (X1), penegakan hukum (X2) dan komitmen organisasi (X3), sisanya 40,6% dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar dari variabel penelitian.

4.2 Pembahasan

Hasil uji regresi linier berganda yang di dapat adalah kesesuaian kompensasi (X1), penegakan hukum (X2) dan komitmen organisasi (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fraud* di sektor pemerintahan (Y). Penelitian ini mendukung hasil penelitian Dian Mustika, S.E., Sri Hastuti, S.E., M.Si., Ak., CA., dan Sucahyo Heriningsih, S.E., M.Si., Ak., CA (2016) yang menyatakan bahwa, “asimetri informasi, penegakan peraturan dan kesesuaian kompensasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*)”.

1. Pengaruh Kesesuaian Kompensasi (X1) Terhadap *Fraud* di Sektor Pemerintahan (Y)

Secara kompensasi atau gaji adalah salah satu hal yang penting bagi setiap karyawan atau pegawai yang bekerja dalam suatu perusahaan, karena dengan gaji yang diperoleh seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut.

Hasil penelitian ini menentang hasil penelitian yang dilakukan Pramudita (2013) yang menyatakan bahwa, “Kesesuaiaan kompensasi berpengaruh negatif terhadap *fraud* di pemerintahan Salatiga”. Jika kompensasi yang diterima pegawai sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan pegawai maka akan meminimalisir akan terjadinya gratifikasi ataupun penyelewengan dana pemerintahan sehingga tidak terjadi *fraud* di sektor pemerintahan.

Variabel kesesuaian kompensasi memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3,842 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 dan t_{tabel} sebesar 1,670 dengan $df = 60$ pada taraf 0,05. Tingkat signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 yang berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa variabel kesesuaian kompensasi berpengaruh positif signifikan terhadap *fraud* di sektor pemerintahan.

2. Pengaruh Penegakan Hukum (X2) Terhadap *Fraud* di Sektor Pemerintahan (Y)

Secara teori penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan Kadek Faisal (2013) yang menyatakan bahwa, “Penegakan hukum berpengaruh positif terhadap *fraud* di sektor pemerintahan”. Jika setiap pegawai bagian internal organisasi mematuhi dan mentaati semua peraturan dan kode etik yang berlaku maka tidak akan terjadi kasus penyalahgunaan dana pemerintah yang digunakan untuk kepentingan pribadi oleh pihak terkait.

Variabel penegakan hukum memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,659 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,010 dan t_{tabel} sebesar 1,670 dengan $df = 60$ pada taraf 0,05. Tingkat signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 dan nilai beta yang dihasilkan adalah positif besar 0,332 yang berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa variabel penegakan hukum berpengaruh positif signifikan terhadap *fraud* di sektor pemerintahan.

3. Pengaruh Komitmen Organisasi (X3) Terhadap *Fraud* di Sektor Pemerintahan (Y)

Secara teori komitmen organisasi adalah individu yang memiliki keinginan untuk berbuat etis terhadap organisasinya dengan tujuan agar terciptanya tujuan yang diinginkan tidak lain semata-mata untuk kepentingan organisasi tersebut.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Mustikasari (2013) yang menyatakan bahwa, “Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap *fraud* di sektor pemerintahan”. Setiap organisasi memiliki komitmen yang ditetapkan, dengan demikian sebaiknya pimpinan organisasi dan pegawai bidang keuangan harusnya mengikuti peraturan dan komitmen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya agar tidak terjadi penyelewengan dana yaitu *fraud* di sektor pemerintahan.

Variabel komitmen organisasi (X3) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3.655 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 dan t_{tabel} sebesar 1,670 dengan $df = 60$ pada taraf 0,05. Tingkat signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 yang berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa komitmen organisasi (X3) berpengaruh positif signifikan terhadap *fraud* di sektor pemerintahan (Y).

4. Pengaruh Kesesuaian Kompensasi (X1), Penegakan Hukum (X2) dan Komitmen Organisasi (X3) Terhadap *Fraud* di Sektor Pemerintahan (Y)

Secara teori *fraud* yang sering terjadi di sektor pemerintahan adalah korupsi. Secara umum korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan pemilik untuk kepentingan pribadi. Korupsi pada level pemerintahan daerah adalah dari sisi penerimaan, pemerasan uang suap, pemberian perlindungan, pencurian barang-barang publik untuk kepentingan pribadi.

Jika seluruh pegawai bagian keuangan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Kota Binjai mendapatkan kompensasi sesuai dengan kebutuhan pegawai maka kecil kemungkinan akan terjadi *fraud* di sektor pemerintahan. Selain itu akan lebih baik jika penegakan hukum diberlakukan sebagaimana mestinya agar tidak ada oknum-oknum yang melakukan penyalahgunaan dana pemerintah untuk kepentingan pribadinya. Sehubungan *fraud* di sektor pemerintahan, maka komitmen organisasi dapat dijadikan sebagai patokan utama bagi setiap pegawai bagian keuangan untuk mengelola keuangan pemerintahan secara baik dan penuh tanggungjawab. Kasus korupsi di pemerintahan terjadi karena adanya peluang, kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk mendapatkan keuntungan pribadi saja.

Hasil uji-F menunjukkan bahwa, Nilai F_{hitung} sebesar 14,304 sedangkan F_{tabel} sebesar 2,76 dengan df pembilang = 3, df penyebut = 60 dan taraf signifikan $\alpha = 0.05$ sehingga $F_{hitung} > F_{tabel}$. Dengan demikian maka H_1 ditolak dan H_0 diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara kesesuaian kompensasi (X1), penegakan hukum (X2), dan komitmen organisasi (X3) secara bersama-sama terhadap *fraud* di sektor pemerintahan (Y).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh kesesuaian kompensasi, penegakan hukum dan komitmen organisasi terhadap *fraud* di sektor pemerintahan. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap 60 dengan menggunakan model regresi linear berganda, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Kesesuaian kompensasi (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap *fraud* di sektor pemerintahan (Y) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Binjai.
2. Penegakan hukum (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap *fraud* di sektor pemerintahan (Y) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Binjai.
3. Komitmen organisasi (X3) berpengaruh positif signifikan terhadap *fraud* di sektor pemerintahan (Y) pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Kota Binjai.
4. Kesesuaian kompensasi (X1), penegakan hukum (X2) dan komitmen organisasi (X3) secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap *fraud* di sektor pemerintahan (Y) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Binjai.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian tersebut, maka penulis mencoba mengemukakan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat diantaranya:

1. Bagi Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Binjai

Dengan adanya penelitian ini maka pimpinan bisa lebih selektif lagi dalam menilai kinerja pegawai dengan menerapkan kesesuaian kompensasi, penegakan hukum dan komitmen organisasi sehingga dapat meminimalisir terjadinya *fraud* dan tidak ada pihak yang melakukan korupsi demi kepentingan pribadinya. Salah satu pertimbangan yang bisa diambil dari penelitian ini adalah bahwa pimpinan bisa mengevaluasi terkait kesesuaian kompensasi yang diberikan, penegakan hukum yang diberlakukan dan komitmen organisasi yang ditetapkan. Dengan demikian pimpinan akan mampu mengontrol kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dalam organisasi tersebut.

2. Bagi Sub Bagian Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Binjai

Penelitian ini bisa menjadi acuan bagi pengendali internal instansi/organisasi terutama sub bagian keuangan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab dalam bekerja. Oleh sebab itu, penting bagi pegawai untuk menyesuaikan kompensasi yang diberikan, kemudian mentaati hukum dan kode etik yang diberlakukan sesuai bidang pekerjaan masing-masing dengan mengikuti komitmen organisasi yang telah ditetapkan oleh setiap organisasi sehingga tidak ada pegawai yang melakukan tindakan korupsi.

3. Bagi Akademisi

Bagi akademisi diharapkan skripsi ini dapat menjadi salah satu referensi tambahan dalam melakukan penelitian dan dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang pengaruh kesesuaian kompensasi, penegakan hukum dan komitmen organisasi terhadap *fraud* di sektor pemerintahan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya mengambil sampel perusahaan pada sektor publik yang berbeda dan jumlah sampel banyak sehingga menghasilkan informasi yang mendukung. Variabel yang digunakan dapat ditambah dengan variabel-variabel lain di luar variabel yang telah digunakan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*. 2016. “*Fraud Indonesia*”.
- Adinda Y, Ikhsan. 2015. “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kecurangan (fraud) di Sektor Pemerintahan Kabupaten Klaten*”. *Accounting Analysis Journal AAJ* 4 (3).
- Aditya, I. 2013. “*Persepsi Pegawai Pemerintah Faktor-Faktor yang Mmempengaruhi Terjadinya Fraud di Sektor Pemerintahan*”. *Accounting Analysis Journal AJJ* 2 (1).
- Faisal, M. 2013. “*Analisis Fraud Di Sektor Pemerintahan Kabupaten Kudus*”. *Accounting Analysis Journal AAJ* 2 (1).
- Fadly, Y. (2019). *Performa Mahasiswa Akuntansi Dalam Implementasi English For Specific Purpose (Esp) Di Universitas Pembangunan Panca Budi (Unpab) Medan*. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 190-201.
- Gbegi, D.O., Adebisi, J.F. 2015. “*Analysis Of Fraud Detection And Prevention Strategies In The Nigerian Public Sector*”. *Journal of Good Governance and Sustainable Development in Africa (JGGSDA)*, Vol 2, No 4.
- Ghozali, Imam. 2016. “*Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*”. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2001. “*Standar Profesional Akuntan Publik*”. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikhsan, Arfan dan Muhammad Ishak. 2015. “*Akuntansi Keperilakuan*”. Jakarta: Salemba Empat.
- Kasmir. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lister, L. A. 2015. “*Practical Approach to Fraud Risk: Comprehensive Risk Assessment Can Enable Auditors to Focus Anti – Fraud Efforts on Areas Where Their Organization is Most Vulnerable*”. *Internal Auditors* Vol. 64 No. 6.
- Mangkunegara, P. 2010. “*Manajemen Sumber Daya Manusia*”. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mustika, Hastuti, dan Hariningsih Suchyo. 2016. “*Analisis Faktor-Faktor yang Mmempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (Fraud): Persepsi Pegawai Dinas Kabupaten Way Kanan Lampung*”. *Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung*.

- Mustikasari Putri. 2013. “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud di Sektor Pemerintahan Kabupaten Batang*”. *Accounting Analysis Journal AAJ* 2 (1).
- Maisyarah, R. (2018). *Analisis sistem pengendalian persediaan bahan pembantu packing material terhadap efisiensi biaya persediaan pada pt. Aquafarm nusantara, unit processing plant di serdang bedagai*. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 56-61.
- Najahningrum. 2013 “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (Fraud): Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY*”. Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado.
- Pramudita, A. 2013. “*Analisis Fraud Di Sektor Pemerintahan Kota Salatiga*”. *Accounting Analysis Journal AAJ* 2 (1).
- Republik Indonesia. Undang-Undang No, 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Sahetapy, J. E. 2013. “*Korupsi di Indonesia*”. http://iaw.or.id/JE%20Sahetapy_Korupsi_di_Indonesia.html Oktober 2016. Diakses Pada Tanggal 21 September 2020, Pukul 09.20 WIB.
- Soekanto, Soejono. 2017. *Sosiologi Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (12 thed)*. Bandung: Alfabeta.
- Sulastri & Simanjuntak Binsar. 2014. “*Fraud pada sektor pemerintah berdasarkan Faktor keadilan kompensasi, sistem pengendalian internal, dan etika organisasi pemerintah (studi empiris dinas pemerintah provinsi DKI Jakarta)*”. Jakarta: Jurnal Universitas Negeri Jakarta.
- Supraja, G. (2020, April). *The influence of tax amnesty benefit perception to taxpayer compliance*. In *Proceedings Of The International Seminar* (Vol. 1, No. 1, pp. 148-156).
- Sari, A. K., Saputra, H., & Nainggolan, W. G. (2019). *Pengaruh Praktik Perataan Laba Pada Perusahaan Tambang Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi Akuntansi*, 5(1), 60-70.
- Tunggal, A. 2011. “*Teori dan Kasus Internal Auditing*”. Jakarta: Harvarindo.

Tuanakotta, Theodorus M. 2010. "*Akuntansi Forensik & Audit Investigatif*". Jakarta. Salemba Empat.

Usman, Syahrani. 2017. "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud di Sektor Pemerintahan*". Jurnal Universitas Islam Negeri Makasar.

Website: <http://www.Antarnews.com>